



BUPATI PATI

PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR : 24 TAHUN 2005

TENTANG

POLA KLASIFIKASI KEARSIPAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang peningkatan ketertiban penyelenggaraan administrasi pemerintah dan pembangunan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati perlu adanya Pola Klasifikasi Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2964);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 nomor 51 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3151);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1979 tentang Tata Kearsipan Departemen Dalam Negeri;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PATI TENTANG POLA KLASIFIKASI KEARSIPAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PATI.

BAB I

POLA KLASIFIKASI KEARSIPAN

Pasal 1

Pola Klasifikasi Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati berpedoman pada ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

Pola Klasifikasi Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, digunakan sebagai Pedoman Penomoran Surat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati.

Pasal 3

Pola Klasifikasi Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, meliputi materi kode-kode dalam bentuk numerik.

BAB II

PEMBIAYAAN

Pasal 4

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Kantor Arsip Daerah Kabupaten Pati.

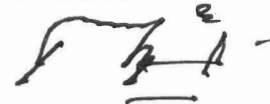
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 7 Oktober 2005

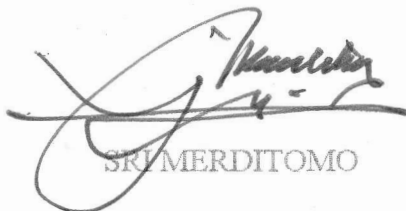
BUPATI PATI



TASIMAN


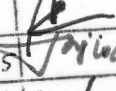
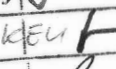


Diundangkan di Pati
pada tanggal 7 Oktober 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI



SRI MERDITOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2005
NOMOR 25

PILIHAN	
PERDA / KEPUTUSAN BUPATI	
Pencatatan	
JABATAN	PARAF
WAKIL BUPATI	
SEKDA 405/19.10.05	
ASISTEN AD. M. S. KEU	
KABAG HUKUM	
KASUBAG PER UU AN	
UNIT PELAKSANA	Arsip. ...

807. 616

979.4	Penerimaan Ganti Rugi Atas Kerugian / Kehilangan Kekayaan Daerah (TP-TGR)
979.41	Sumbangan Pihak Ke Tiga
979.42	Sumbangan Pihak Ke Tiga Kendaraan (Dealer)
979.43	Sumbangan Pihak Ke Tiga Kayu
979.5	Penerimaan Lain-lain
979.51	Penerimaan Kembali Kredit BKK
979.52	Ternak Tidak Layak Bibit
979.53	Sewa Internet
979.54	Penerimaan Dari Dana Bergulir / Revolving
979.55	Kerjasama dengan BUMIDA
979.56	Penerimaan DUKS
979.57	Tempat Rekreasi
979.58	Setoran TP-TGR
979.59	Penerimaan lainnya dari Setda / Dinas-dinas
980	PENGELUARAN
981	-
982	-
983	-
984	-
985	-
986	-
987	-
988	-
989	-
990	BENDAHARAWAN
991	SKPP
992	Tegoran SPJ
993	-
994	-
995	-
996	-
997	-
998	-
999	-

PENELITIAN	
PERDA / KEPUTUSAN BUPATI	
PERATURAN	
JABATAN	PARAF
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN <i>Adm. & KECU</i>	
<i>Ym</i> KABAG HUKUM	<i>2</i>
KASUBAG PER UU AN	<i>2</i>
UNIT PELAKSANA	<i>AP. S.p.</i>

BUPATI PATI



TASIMAN



BUPATI PATI

PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR : 24 TAHUN 2005

TENTANG

POLA KLASIFIKASI KEARSIPAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang peningkatan ketertiban penyelenggaraan administrasi pemerintah dan pembangunan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati perlu adanya Pola Klasifikasi Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2964);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 nomor 51 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3151);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1979 tentang Tata Kearsipan Departemen Dalam Negeri;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PATI TENTANG POLA KLASIFIKASI KEARSIPAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PATI.

BAB I

POLA KLASIFIKASI KEARSIPAN

Pasal 1

Pola Klasifikasi Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati berpedoman pada ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

Pola Klasifikasi Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, digunakan sebagai Pedoman Penomoran Surat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati.

Pasal 3

Pola Klasifikasi Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, meliputi materi kode-kode dalam bentuk numerik.

BAB II

PEMBIAYAAN

Pasal 4

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Kantor Arsip Daerah Kabupaten Pati.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 7 Oktober 2005

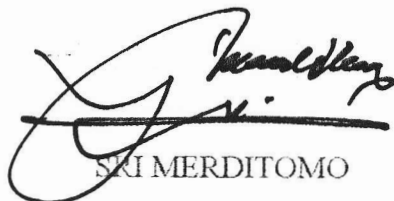
BUPATI PATI



TASIMAN

Diundangkan di Pati
pada tanggal 7 Oktober 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI



SRI MERDITOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2005
NOMOR 25

POLA KLASIFIKASI KEARSIPAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PATI

I. PENDAHULUAN

Tujuan Pola Klasifikasi Kearsipan antara lain sebagai pedoman penomoran surat dan memberikan petunjuk surat sesuai dengan permasalahannya sehingga mudah ditemukan kembali. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan sistem pengendalian arsip yang berdaya guna dan berhasil guna dengan menciptakan sistem pengendalian masalah yang terkandung di dalam arsip.

Salah satu sub sistem dari sistem pengendalian dimaksud ialah mengklasifikasikan surat yang artinya memisahkan surat atas dasar perbedaan yang ada dan mengelompokkannya atas dasar persamaan yang ada yang merupakan dasar untuk penataan arsip secara sistematis dan efektif, agar memudahkan penemuan kembali arsip sehingga pelayanan penyajian informasi kepada pimpinan dapat dilaksanakan dengan tepat dan cepat.

Mengingat fungsi Pola Klasifikasi Kearsipan dapat digunakan sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan tugas administrasi maka penyusunan pola klasifikasi ini diarahkan dalam rangka kegunaannya bagi kepentingan petugas arsip maupun pimpinan sebagai penunjang peningkatan penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pembangunan.

II. BENTUK DAN SUSUNAN

1. Klasifikasi kearsipan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati merupakan klasifikasi yang disusun berdasarkan masalah, mencerminkan fungsi dan kegiatan pelaksanaan tugas dari semua satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah kabupaten Pati. Pola klasifikasi disusun secara berjenjang dengan mempergunakan prinsip perkembangan dari umum kepada khusus dalam hubungan masalah, dengan 3 perincian dasar, masing-masing perincian pertama, perincian kedua dan perincian ketiga sebagai pola dasar.
2. Sesuai dengan sifat desimal arsip dikelompokkan dalam 10 pokok masalah ini terlebih dahulu dibedakan antara tugas substantif (pokok) dan tugas fasilitatif (penunjang).

3. Angka 100 s/d 600 merupakan kode tugas-tugas substantip, sedangkan angka 000, 700, 800 dan 900 merupakan kode tugas-tugas fasilitatip.

Kode 000 menampung masalah-masalah fasilitatip diluar masalah pengawasan , kepegawaian dan keuangan.

Disamping itu juga ditampung masalah yang berkaitan dengan kerumah-tangga, seperti protokol, urusan dalam dan masalah-masalah yang tidak dapat dimasukan dalam kelompok lainnya, seperti perjalanan dinas, peralatan, lambang negara atau daerah, tanda-tanda kehormatan dan sebagainya.

Dengan demikian maka sepuluh pokok masalah tersebut telah menampung seluruh kegiatan pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah Kabupaten Pati.

Sepuluh kelompok pokok masalah tersebut adalah sebagai berikut :

000 Umum

100 Pemerintahan

200 Politik

300 Keamanan / Ketertiban

400 Kesejahteraan Rakyat

500 Perekonomian

600 Pekerjaan umum dan Ketenagaan

700 Pengawasan

800 Kepegawaian

900 Keuangan

4. Kode adalah alat untuk mengenali masalah yang dikandung dalam arsip, dan disamping itu juga sebagai alat penentu dimana letak arsip itu dalam urutan hubungan masalahnya pada susunan seluruh arsip dalam simpanan. Kode ini menunjukkan ada urutan sistimatis dari masalah-masalah arsip dan kartu kendali dalam file.

5. Kode pembantu merupakan bentuk penyajian dari masalah tertentu yang merupakan aspek yang selalu timbul berkaitan dengan masalah lainnya, ditambahkan dibelakang tiap kode yang memerlukan perincian lebih lanjut , untuk dapat memberikan dimensi ekstra pada arsip.

Kode pembantu di maksud adalah :

01 Perencanaan

02 Penelitian

03 Pendidikan

04 Laporan

05 Panitia

06 Seminar, Lokakarya, Workshop

07 Stasistik

08 Peraturan Perundang-undangan

09 Tidak dipakai

III. CARA PENGGUNAAN.

1. Untuk memahami pola klasifikasi terlebih dahulu harus memahami perincian pertama, kedua dan ketiga. Selanjutnya perlu memahami hubungan antara masalah dengan anak masalah pada pola dengan memperhatikan efek dari prinsip berjenjang. Tiap kode, kecuali kode pokok masalah pada perincian pertama, merupakan bagian dan sub ordinat dari kode atasnya. Untuk mendapatkan gambaran yang benar tentang masalah misalnya 412 harus diketahui bahwa masalah ini merupakan bagian dari 410. Selanjutnya diketahui bahwa 410 merupakan bagian dari 400 Disamping itu perlu diperhatikan kekhususan kelas 000.

Contoh :

400 Kesejahteraan Rakyat (perincian pertama)

410 Pembangunan Desa (Perincian)

411 -

412 Perekonomian Desa (Perincian ketiga)

2. Untuk dapat mengklasifikasikan surat dengan kode setepat-tepatnya harus dipahami masalah yang dikandungnya, dari sudut pandangan mana masalah itu disajikan. Untuk menentukan masalah dalam surat tidak selalu mudah.

Pada umumnya "prinsip" surat yang dicantumkan di bagian kiri atas surat memang ada hubungannya dengan masalah surat, tetapi kerap kali "perihal" tersebut merupakan petunjuk yang kurang tepat. Oleh karena itu untuk menentukan kode yang tepat, harus membaca dan memahami masalah yang dikandung dalam surat. Harus selalu diingat, bahwa penemuan kembali surat banyak sekali tergantung pada ketepatan pemberian kode.

3. Banyak surat yang mengandung lebih dari satu masalah. Masalah-masalah itu dapat merupakan masalah yang terpisah satu sama lain atau masalah-masalah yang saling berkaitan. Dalam menghadapi hal yang demikian itu harus berhati-hati memilih masalah yang akan ditentukan menjadi masalah pokok.

Masalah yang dipilih haruslah yang paling berat tekanannya dan harus diyakini benar, bahwa masalah itulah yang akan kemukakan dalam penemuan kembali arsip.

4. Pemberian kode masalah dapat ditetapkan secara umum atau lebih terperinci.

5. Kode pembantu.

Kode pembantu merupakan kode pelengkap yang tidak dapat dipakai tersendiri,

Dengan ditambahkan kode pembantu, maka kode dapat memberikan dimensi ekstra pada arsip.

6. Menyusun Kode

Untuk memperoleh kode yang lebih spesifik, kode-kode masalah yang satu dapat digabungkan dengan kode-kode masalah yang lain. Cara penggabungan ini dapat dilihat contohnya pada kode 050 dan 700.

Perencanaan maupun proyek pembangunan dapat meliputi semua bidang kegiatan. Oleh karena itu untuk memperoleh kode yang terperinci, maka kode 050 dapat disambungkan dengan seluruh perincian kode dalam pola dari 000 sampai 900.

Begitu juga Pengawasan (700) yang meliputi bidang apapun, dapat digabungkan dengan perincian kode dalam pola.

6. Ada beberapa masalah yang dapat diklasifikasikan dengan 2 macam kode, dan 2 kode yang berlainan itu sama-sama benar.

Contoh :

- a. Peraturan Pemerintah tentang Pensiun, bisa diklasifikasikan dengan kode 188 Peraturan Pemerintah, atau 882 Peraturan tentang pensiun. Masalah pemberhentian dengan pensiun (882), ditambah dengan kode pembantu untuk Peraturan Perundang-Undangan (08).
- b. Penelitian penghasilan Pamong Desa, dapat diklasifikasikan 070 (penelitian) atau 142.02 (Penelitian Penghasilan Pamong Desa). Masalahnya penghasilan Pamong Desa (142) ditambah dengan kode pembantu untuk penelitian (02).

Kedua cara pengklasifikasian ini sama-sama benar. Cara ini dimaksudkan untuk memberi keleluasaan pada penataan berkas. Jika penataan berkas akan dilakukan dengan cara mengelompokkan semua jenis peraturan pemerintah, atau semua kegiatan penelitian, maka arsip diklasifikasikan tanpa kode pembantu, tetapi jika penataan berkas dilakukan berdasarkan masalahnya, maka yang diklasifikasikan ialah masalahnya ditambah dengan kode pembantu.

PERINCIAN DASAR

000	UMUM
100	PEMERINTAHAN
200	P O L I T I K
300	KEAMANAN / KETERTIBAN
400	KESEJAHTERAAN RAKYAT
500	PEREKONOMIAN
600	PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN
700	PENGAWASAN
800	KEPEGAWAIAN
900	KELUARAN

PERINCIAN KEDUA

000 UMUM

- 010 Urusan Dalam
- 020 Peralatan
- 030 Kekayaan Daerah
- 040 Perpustakaan / Dokumen / Kearsipan / Sandi
- 050 Perencanaan
- 060 Organisasi / Ketatalaksanaan
- 070 Penelitian
- 080 Konperensi
- 090 Perjalanan Dinas

100 PEMERINTAHAN

- 110 Pemerintahan Pusat
- 120 Pemda Tk.I
- 130 Pemda Tk. II
- 140 Pemerintah Desa
- 150 DPR-MPR
- 160 DPRD Tk. I
- 170 DPRD Tk. II
- 180 H u k u m
- 190 Hubungan Luar Negeri

200 P O L I T I K

- 210 Kepertaian
- 220 Organisasi Kemasyarakatan
- 230 Organisasi Profesi & Fungsional
- 240 Organisasi Pemuda
- 250 Organisasi Buruh, Tani, Nelayan
- 260 Organisasi Wanita
- 270 Pemilihan Umum
- 280 -
- 290 -

300 KEAMANAN / KETERTIBAN

- 310 Pertahanan
- 320 Kemiliteran
- 330 Keamanan
- 340 Pertahanan Sipil
- 350 Kejahatan
- 360 Bencana
- 370 Kecelakaan
- 380 -
- 390 -

400 KESEJAHTERAAN RAKYAT

- 410 Pembangunan Desa
- 420 Pendidikan
- 430 Kebudayaan
- 440 Kesehatan
- 450 Agama
- 460 Sosial
- 470 Kependudukan
- 480 Media Massa
- 490 -

500 PEREKONOMIAN

- 510 Perdagangan
- 520 Pertanian
- 530 Perindustrian
- 540 Pertambangan / Kesamudraan
- 550 Perhubungan
- 560 Tenaga Kerja
- 570 Permodalan
- 580 Perbankan / Moneter
- 590 Agraria

600 PEKERJAAN UMUM & KETENAGAAN

- 610 Pengairan
- 620 Jalan
- 630 Jembatan
- 640 Bangunan

650 Tata Ruang Kota

660 Tata Lingkungan

670 Ketenagaan

680 Peralatan

690 Air Minum

700 PENGAWASAN

710 Bidang Pemerintahan

720 Bidang Politik

730 Bidang Keamanan / Ketertiban

740 Bidang Kesra

750 Bidang Perekonomian

760 Bidang Pekerjaan Umum

770 -

780 Bidang Kepegawaian

790 Bidang Keuangan

800 KEPEGAWAIAN

810 Pengadaan

820 Pengangkatan & Mutasi

830 Kedudukan

840 Kesejahteraan

850 C U T I

860 Penilaian

870 Tata Usaha

880 Pemberhentian

890 Pendidikan

900 KEUANGAN

910 Anggaran

920 Otorisasi

930 Verifikasi

940 Pembukuan

950 Perbendaharaan

960 Pembinaan Kebendaharaan

970 Pendapatan

980 -

PERINCIAN KE TIGA

KODE KLASIFIKASI BARU / TAMBAHAN

- 000 **UMUM**
- 001 Lambang
- 001.1 Garuda
- 001.2 Bendera Kebangsaan
- 001.3 Daerah (Propinsi / Kabupaten /Kota)
- 002 Tanda Kehormatan / Penghargaan
(untuk pegawai lihat 861 -1)
- 002.1 Bintang
- 002.2 Satya Lencana
- 002.3 Satyakarya Nugraha
- 002.4 Monumen
- 002.5 Penghargaan Secara Adat
- 002.6 Penghargaan lainnya (Cinderamata)
- 003 Hari Raya /Besar
- 003.1 Nasional, 17 Agustus, Hari Pahlawan dsb
- 003.2 Keagamaan
- 003.3 Hari Ulang Tahun (HUT)
- 004 Ucapan
- 004.1 Terima Kasih
- 004.2 Selamat
- 004.3 Mohon Diri
- 004.4 Bela Sungkawa
- 004.5 Ucapan Lainnya
- 005 Undangan
- 006 Tanda Jabatan
- 006.1 Pamong Praja
- 006.2 Pejabat Lainnya
- 007 Tanda Gambar Presiden, Wakil Presiden dan Pejabat pemerintah
- 008 -
- 009 -
- 010 **URUSAN DALAM**
- 011 Audit Energi
- 011.1 Instalasi Listrik/Gedung Kantor
- 011.2 Otomasi
- 011.3 Air Minum
- 011.4 Bak
- 011.5 Hidrant
- 011.6 Alarm
- 012 Rumah Dinas
- 012.1 Tanah Untuk Rumah Dinas
- 012.2 Perabotan

013	Persinggahan
013.1	Mess
013.2	Wisma
013.3	Hotel
014	Akomodasi
015	Penerangan Listrik
016	Telepon
017	Keamanan / Tata Tertib Kantor
018	Kebersihan Kantor
019	Protokol
019.1	Upacara Bendera
019.11	Petugas Upacara
019.12	Inspektur Upacara
019.2	Tata Tempat (pemasangan gambar Presiden / Wapres)
019.3	Audensi
019.4	Alamat-Alamat Kantor dan Pejabat
019.41	Pindah Alamat
019.5	Penerimaan Tamu
019.6	Kerjasama
019.7	Bandir / Umbul- Umbul
020	PERALATAN
020.1	Penawaran
020.2	Pengadaan
021	Alat Tulis
022	Mesin Kantor
022.1	Manual
022.2	Elektronik
023	Perabot Kantor
024	Alat Angkutan
024.1	Orang
024.2	Barang
025	Pakaian Dinas
026	Senjata
027	Penunjukan Langsung
27.1	Lelang
27.2	Perjanjian Pemborongan
028	Penghapusan
029	Pengurusan Kendaraan
029.1	STNK, BPKB
030	KEKAYAAN DAERAH
031	Barang-barang tidak bergerak (tanah, kebun dll)

032	Barang-barang tidak bergerak (gedung, asrama dll)
033	Barang-barang tidak bergerak (monumen)
034	Alat-alat besar
035	Hewan
036	Barang persediaan dalam gudang
037	Alat pengangkut (darat, laut, udara)
038	Peralatan kantor / pabrik
039	Peralatan rumah sakit
040	PERPUSTAKAAN / DOKUMEN / KEARSIPAN / SANDI
041	Perpustakaan
041.1	Perpustakaan Umum
041.2	Perpustakaan khusus
041.3	Perpustakaan Perguruan Tinggi
041.4	Perpustakaan Sekolah
041.5	Perpustakaan Keliling
041.6	Pengadaan Bahan Pustaka
041.7	Pelayanan
041.8	Pemeliharaan
041.9	Kerjasama antar perpustakaan
042	Dokumentasi
043	-
044	-
045	Kearsipan
045.1	Ekspedisi
045.2	Surat Pengantar
045.3	Salah kirim
045.4	Pola klasifikasi
045.5	Penataan berkas
045.6	Pameran Kearsipan
045.6	Penyusutan Arsip
045.61	Pemindahan Arsip
045.62	Penyerahan Arsip
045.63	Pemusnahan Arsip
045.64	Jadwal Retensi Arsip
045.65	Berita Acara Penyusutan Arsip
045.66	Daftar Pertelaan Arsip
045.7	Pembinaan Kearsipan
045.71	Bimbingan teknis
045.72	Sosialisasi
045.73	Monitoring dan Evaluasi
045.8	Pemeliharaan /Perawatan Arsip
045.81	Fumigasi
045.82	Termite Control
045.83	Kapur Barus
045.9	Pengawetan / konservasi
046	Sandi
047	Telegram, Telex, Radio, ISB, Faxmule

- 048 Data Elektronik
049 -
- 050 PERENCANAAN**
Meliputi Rencana Pembangunan dan Perencanaan Umum
Departemen Dalam Negeri. Klasifikasikan disini proyek-proyek pembangunan, Program Pembangunan Nasional (Propenas), Program Pembangunan Daerah (Properda, DASK, RASK, Laporan fisik dan keuangan proyek Pembangunan, SIAP, Tender, Pemborong, Laporan Pelaksanaan Kinerja, Musrenbang, Musrenbangpus antar Departemen, Musrenbangnas.
- 050.1 Program Pembangunan Nasional (Propernas)
050.2 Program Pembangunan Daerah (Properda)
050.3 Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
- 051 Bidang Pemerintahan
051.1 DUP
051.2 DASK
051.3 RASK
- 052 Bidang Politik
52.1 Laporan Keuangan
52.2 Laporan Pelaksanaan Kinerja
- 053 Perencanaan Kegiatan Pembangunan
054 Bidang Kesejahteraan Rakyat
055 Bidang Perekonomian
056 Bidang Pekerjaan Umum
057 Bidang Pengawasan
058 Bidang Kepegawaian
059 Bidang Keuangan
- 060 ORGANISASI / KETATALAKSANAAN**
061 Organisasi
061.1 Susunan dan Tatakerja
061.2 Tata tertib Kantor, jam kerja
- 062 Organisasi Badan Non Pemerintah
063 Organisasi Badan Internasional
064 Organisasi Semi Pemerintah BKS-AKSI
- 065 Ketatalaksanaan
065.1 Tata naskah dinas
065.2 Stempel
065.21 Stempel jabatan
065.22 Stempel dinas
065.3 Papan nama instansi pemerintah/non pemerintah
- 066 Tata Hubungan Kerja
- 067 Sistem dan Prosedur
- 068 Evaluasi dan Pelaporan Ketatalaksanaan
068.1 Pemantauan Pelaksanaan
068.2 Sistem Prosedur Kerja
068.3 Evaluasi Pelaksanaan Sistem

- 068.4 Rekomendasi Penyempurnaan Ketatalaksanaan
- 069 Analisis Jabatan dan pengukuran beban Kerja
- 069.1 Analisis Jabatan
- 069.2 Hasil Analisis Jabatan
- 069.3 Penilaian Jabatan struktural dan Fungsional
- 069.4 Rekomendasi Penyempurnaan Ketatalaksanaan
- 070 PENELITIAN**
- 071 Riset
- 072 Survey
- 073 Kajian
- 074 Kerjasama penelitian dengan perguruan Tinggi Negeri
- 075 Kerjasama penelitian dengan perguruan Tinggi Swasta
- 076 Kerjasama penelitian dengan LSM
- 077 Kerjasama penelitian dengan swasta (CV/PT)
- 078 Study Kelayakan, Study Banding
- 079 Study Kasus
- 080 KONFERENSI**
- 081 Gubernur
- 082 Bupati/Walikota
- 083 Komponen, Eselon lainnya
- 084 Instansi lainnya
- 085 Internasional di Dalam Negeri
- 086 Internasional di Luar Negeri
- 087 -
- 088 -
- 089 -
- 090 PERJALANAN DINAS**
- 091 Perjalanan Presiden / Wakil Presiden ke Daerah
- 092 Perjalanan Menteri ke Daerah
- 093 Perjalanan Pejabat Tinggi (Pejabat Eselon I)
- 094 Perjalanan Pegawai, termasuk pemanggilan pegawai
- 095 Perjalanan Tamu Asing ke Daerah
- 096 Perjalanan Presiden / Wakil Presiden ke Luar Negeri
- 097 Perjalanan Menteri ke Luar Negeri
- 098 Perjalanan Pejabat Tinggi ke Luar Negeri
- 099 Perjalanan Pegawai ke Luar Negeri
- 100 PEMERINTAHAN**
- 101 -
- 102 -
- 103 -
- 104 -
- 105 -
- 106 -
- 107 -
- 108 -
- 109 -
- 110 PEMERINTAHAN PUSAT**
- 111 Presiden
- Meliputi pencalonan, pengangkatan, pelantikan, sumpah dan serah terima Jabatan.

- 111.1 Pertanggungjawaban Presiden kepada MPR
- 111.2 Amanat Presiden / Amanat Kenegaraan

- 112 Wakil Presiden
Meliputi pencalonan, pengangkatan, pelantikan, sumpah dan serah terima jabatan

- 113 Susunan Kabinet
- 113.1 Reshuffle
- 113.2 Penunjukan Menteri ad interim
- 113.3 Sidang kabinet, Sidang Dewan Stabilitas Ekonomi, lihat 500.1

- 114 Departemen Dalam Negeri
- 114.1 Amanat Menteri Dalam Negeri
- 115 Departemen Lainnya
- 116 Lembaga Tinggi Negara
- 117 Lembaga Non Departemen
- 118 Otonomi Desentralisasi
- 119 Kerjasama antar Departemen

- 120 **PEMERINTAHAN PROPINSI**
Laporan Daerah
- 120.1 Koordinasi
- 120.2 Instansi Tingkat Propinsi
- 120.21 Dinas Otonomi
- 120.22 Instansi Vertikal

- 121 Kepala Daerah
Meliputi pencalonan, pengangkatan, pelantikan, pemberhentian, serah terima jabatan dan sebagainya
- 122 Wakil Kepala Daerah
Meliputi pencalonan, pengangkatan, pelantikan, pemberhentian, serah terima jabatan dan sebagainya
- 123 Sekretaris Wilayah / Daerah
Meliputi pencalonan, serah terima jabatan
- 124 Badan-badan pertimbangan Daerah, meliputi Muspida

- 125 Pembentukan / Pemekaran
- 125.1 Pembentukan Daerah Otonom
- 125.2 Pembentukan Wilayah
- 125.3 Perubahan Batas Wilayah
- 125.4 Pemekaran Wilayah
- 125.5 Penambahan Ibu Kota Propinsi, Pemberian dan penggantian nama kota, daerah, gunung, sungai, pulau, selat, jalan dsb.

- 126 Pembagian Wilayah
- 127 Penyerahan Urusan
- 128 Swapraja
- 129 -

- 130 **PEMERINTAHAN KABUPATEN / KOTA**
- 130.1 Koordinasi
- 130.2 Instansi tingkat Propinsi
- 130.21 Dinas Otonomi
- 130.22 Instansi Vertikal

- 131 Kepala Daerah
Meliputi pencalonan, pengangkatan, pelantikan, pemberhentian, serah terima jabatan, Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ), Team Memori, dan sebagainya
- 132 Wakil Kepala Daerah
Meliputi pencalonan, pengangkatan, pelantikan, pemberhentian, serah terima jabatan dan sebagainya
- 133 Sekretaris Daerah
Meliputi pencalonan, serah terima jabatan.
- 134 Badan-badan daerah, meliputi Badan Pertimbangan Daerah, Muspida
- 135 Pembentukan Daerah
- 135.1 Pembentukan Daerah Otonom
- 135.2 Pembentukan Wilayah
- 135.3 Perubahan Batas Wilayah
- 135.4 Pemekaran Wilayah
- 135.5 Permasalahan Batas Wilayah
- 135.6 Pemindahan Ibu Kota Kabupaten/ Kotamadya
- 135.7 Pemberian dan Penggantian Nama Kota, Daerah, Jalan
- 136 Pembagian Wilayah
- 137 Penyerahan Urusan/Pendelegasian Kewenangan
- 138 Pemerintahan Wilayah Kecamatan
- 138.1 Sambutan/pengarahan/amanat
- 138.2 Pembentukan kecamatan
- 138.3 Pemekaran kecamatan
- 138.4 Perluasan/Perubahan batas wilayah kecamatan
- 138.5 Pemindahan ibu kota kecamatan
- 138.6 Laporan kecamatan
- 139 -
- 140 **PEMERINTAHAN DESA**
- 141 Pemerintahan Desa, Kelurahan
- 141.1 Kepala Desa, kelurahan meliputi pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pemberhentian sementara, pelantikan, serah terima dsb.
- 141.11 Biaya pemilihan kepala desa
- 141.2 Badan Permusyawaratan Desa, meliputi pembentukan keanggotaan, kepengurusan dan kegiatan BPD (Badan Permusyawaratan Desa)
- 141.3 Perangkat desa, kelurahan
- 141.31 Sekretaris desa, kelurahan meliputi pencalonan, penyeleksian, pengangkatan, pemberhentian, pemberhentian sementara
- 141.32 Perangkat Desa meliputi pencalonan, penyeleksian, pengangkatan, pemberhentian, pemberhentian sementara.
- 142 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Des)
- 142.1 Rutin (termasuk penghasilan Perangkat Desa)
- 142.2 Pembangunan
- 142.3 Anggaran Belanja Tambahan
- 142.4 Pendapatan desa
- 142.41 Urusan desa

- 142.42 Penerimaan yang berasal dari Pemerintah Pusat
- 142.43 Penerimaan yang berasal dari Pemerintah Propinsi
- 142.44 Penerimaan yang berasal dari Pemerintah Kabupaten/Kota
- 142.45 Penerimaan yang berasal dari pajak dan retribusi daerah yang diserahkan kepada desa
- 142.46 Penerimaan dari pemilik-pemilik tanah yang berdomisili di luar desa
- 142.47 Pendapatan asli desa
- 142.48 Penerimaan lain-lain yang syah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- 142.49 Hasil dari gotong-royong masyarakat.

- 143 Kekayaan Desa
 - 143.1 Tanah hak pakai desa.
 - 143.11 Tanah bengkok
 - 143.12 Tanah titisara
 - 143.13 Tanah penganggonan
 - 143.14 Tanah desa lainnya

- 143.2 Jalan desa
- 143.3 Bangunan desa

- 144 Lembaga – lembaga tingkat desa
 - 144.1 BPD (Badan Pemusyawaratan Desa)

- 145 Administrasi Desa

- 146 Kewilayahan
 - 146.1 Pemekaran desa / kelurahan
 - 146.2 Pembentukan desa / kelurahan
 - 146.3 Perubahan batas wilayah/perluasan desa/kelurahan
 - 146.4 Perubahan nama desa / kelurahan
 - 146.5 Permasalahan batas desa
 - 146.6 Penyatuan desa /kelurahan
 - 146.7 Penghapusan desa /kelurahan

- 147 Lembaga-lembaga tingkat desa jangan diklarifikasikan disini.Lihat 410 dengan perinciannya

- 148 Pembangunan desa
 - 148.1 Pembinaan usaha gotong-royong
 - 148.11 Swadaya gotong-royong
 - 148.12 Lembaga Sosial Desa (LSD)
 - 148.13 Latihan Kerja Masyarakat
 - 148.14 Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
 - 148.15 Penyuluhan
 - 148.16 Kelembagaan Desa

- 148.2 Perekonomian Desa
 - 148.21 Produksi Desa
 - 148.22 Keuangan desa
 - 148.23 Koperasi desa
 - 148.24 Penataan bantuan pembanguana desa
 - 148.25 Alokasi bantuan pembangunan desa
 - 148.26 Pelaksanaan bantuan pembangunan desa

148.3	Prasarana desa
148.31	Pembinaan
148.32	Bimbingan teknis
148.33	Pemukiman kembali penduduk
148.34	Masyarakat pradesa
148.35	Pemugaran perumahan dan lingkungan desa
148.4	Pengembangan desa
148.41	Tingkat perkembangan desa
148.42	Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP)
148.43	Tata Desa
148.44	Perlombaan desa
148.5	Koordinasi
148.51	Sektor khusus (K)
148.52	Rapat koordinasi horizontal (RKH)
148.53	Team koordinasi pusat
148.54	Kerjasama
149	RT - RW / RK
150	LEGISLATIF MPR / DPR
151	Keanggotaan MPR
151.1	Pencalonan
151.2	Pengangkatan
151.3	Pemberhentian
151.31	Recall
151.32	Meninggal
151.4	Pelanggaran
152	Persidangan
153	Kesejahteraan
153.1	Keuangan
153.2	Penghargaan
154	Hak
155	Keanggotaan DPR
155.1	Pencalonan
155.2	Pengangkatan
155.3	Pemberhentian
155.31	Recall
155.32	Meninggal
155.4	Pelanggaran
156	Persidangan
156.1	Sidang Pleno
156.2	Dengar Pendapat
156.3	Rapat Komisi
156.4	Reses
157	Kesejahteraan
157.1	Keuangan
157.2	Penghargaan

158	Jawaban Pemerintah
159	Hak
160	DPRD PROPINSI
161	Keanggotaan
161.1	Pencalonan
161.2	Pengangkatan
161.3	Pemberhentian
161.31	Recall
161.32	Meninggal
161.4	Pelanggaran
162	Persidangan
162.1	Sidang Pleno
162.2	Dengar pendapat
162.3	Rapat-rapat meliputi rapat panitia musyawarah, komisi, panitia khusus, dsb
162.4	Fraksi
162.5	Tata tertib
162.6	Reses
162.7	Peninjauan study banding
163	Kesejahteraan
163.1	Keuangan
163.2	Penghargaan
164	Hak
165	Sekretaris DPRD Propinsi
166	-
167	-
168	-
169	-
170	DPRD KABUPATEN / KOTA
171	Keanggotaan
171.1	Pencalonan
171.2	Pengangkatan
171.3	Pemberhentian
171.31	Recall
171.32	Meninggal
171.4	Pelanggaran
172	Persidangan
172.1	Sidang pleno
172.2	Dengar pendapat
172.3	Rapat-rapat meliputi rapat panitia musyawarah, komisi, panitia khusus, dsb
172.4	Fraksi
172.5	Tata tertib
172.6	Reses
172.7	Peninjauan study banding
173	Kesejahteraan
173.1	Keuangan
173.2	Penghargaan

174	Hak
175	Sekretaris DPRD Kab/ kota
176	-
177	-
178	-
179	-
180	HUKUM
180.1	Konstitusi
180.11	Dasar Negara
180.12	Undang-undang Dasar
180.2	GBHN
180.3	Konvensi
181	Perdata
181.1	Tanah
181.2	Rumah
181.3	Utang Piutang
181.31	Gadai
181.32	Hipotik
182	Pidana
183	Peradilan
183.1	Jenis-jenis peradilan
183.11	Peradilan umum
183.111	Peradilan Negeri Tingkat Pertama
183.112	Pengadilan tinggi
183.113	Mahkamah Agung
183.12	Peradilan Agama Islam
183.121	Pengadilan agama Islam Tingkat Pertama
183.122	Pengadilan Tinggi Agama Islam
183.123	Mahkamah Agama Islam Agung
183.13	Peradilan Militer
183.131	Mahkamah Militer Tingkat Pertama
183.132	Mahkamah Militer Tinggi
183.133	Mahkamah Militer Agung
183.14	Peradilan Tata Usaha Negara
183.141	Pengadilan Tata Usaha Tingkat Pertama
183.142	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
183.143	Mahkamah Tata Usaha Negara Agung
183.2	Upaya Hukum
183.21	Banding
183.22	Kasasi
183.23	Derden Verzet
183.24	Peninjauan Kembali
183.3	Eksekusi

183.4	Pembinaan Hukum
183.41	Pembina Kesadaran hukum (KADARKUM)
183.5	Bantuan Hukum
183.51	Lembaga Bantuan Hukum
183.6	Notaris
184	Hukum Internasional
185	Imigrasi
186	Kepenjaraan
187	Kejaksaan
188	Peraturan Perundang-undangan
189	Hukum Adat
190	HUBUNGAN LUAR NEGERI
191	Pewakilan Asing
192	Tamu Negara
193	Kerjasama dengan Negara Asing
194	Perwakilan RI di Luar Negeri
195	PBB
196	Laporan Luar Negeri
197	-
198	-
199	-
200	POLITIK
201	Perencanaan dan Program Pembinaan Politik Luar Negeri
201.1	Pembinaan Idiologi Pancasila
201.2	Kesatuan bangsa organisasi kekuatan sosial politik
201.3	Oganisasi kemasyarakatan
201.4	Pelaksanaan pembinaan politik dalam negeri termasuk laporannya
201.5	Keadaan politik luar negeri
201.6	Pemberitahuan keadaan bahaya dan jam malam meliputi pemberitahuan, ketentuan pelaksanaan dan pengawasan
201.7	Hasil Evaluasi dan Tata mengenai Ipoleksosbud, Kamtibmas
201.8	PARPOL
201.81	Pendirian / Pembentukan PARPOL
201.82	Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PARPOL
201.83	Pogram kerja, data kegiatan PARPOL
201.84	Pembinaan PARPOL
201.85	Hasil Munas / Musda PARPOL
201.86	Struktur / Kepengurusan, pengkaderan dan keanggotaan PARPOL
201.87	Data invertaris dan keuangan PARPOL
201.9	Partai / organisasi terlarang
201.91	Keputusan pembubaran partai / oganisasi terlarang
201.92	Daftar dan data pengurus anggota partai oganisasi terlarang
201.93	Izin meninggalkan tempat atau domisili bagi anggota partai / organisasi terlarang
201.94	Daftar berkala mengenai keadaan oganisasi / anggota partai / organisasi terlarang

202.1	Laporan umum mengenai Keadaan anggota partai /organisasi terlarang
202.2	Organisasi Kemasyarakatan
202.21	LSM
202.22	Yayasan
202.23	Organisasi
202.3	Pembentukan organisasi
202.4	Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
202.5	Kepengurusan dan daftar organisasi
202.6	Program Kerja organisasi
202.7	Munas/Musda TK.I dan TK II
202.8	Pembinaan organisasi
202.81	Kegiatan organisasi
202.82	Daftar inventaris kekayaan organisasi
202.83	Lembaga Swadaya Masyarakat
202.84	Pembentukan organisasi
202.85	Kepengurusan dan daftar anggota organisasi
202.86	Kepengurusan dasar dan daftar anggota organisasi
202.87	Pogram kerja organisasi
202.88	Laporan kegiatan organisasi
202.89	Penerbitan STTPKO (Surat Tanda Terima Pemberitahuan Keberadaan Organisasi)
203	Orde Baru
204	Orde pemerintahan
205	-
206	-
207	-
208	-
209	-
210	KEPARTAIAN
211	Partai Peserta Pemilu
212	-
213	-
214	-
215	-
216	-
217	-
218	-
219	-
220	ORGANISASI KEMASYARAKATAN
221	Berdasarkan Perjuangan
221.1	Perintis Kemerdekaan
221.2	Angkatan 45
221.3	Veteran
222	Bedasarkan kekaryaan
222.1	PEPABRI
222.2	Wreda Tama
222.3	Pensiunan PNS
223	Bedasarkan Kerohanian
223.1	Muhamadiyah
223.2	NU
223.3	Persatuan Sarikat Islam

224	-
225	-
226	-
227	-
228	-
229	-
230	ORGANISASI PROFESI DAN FUNGSIONAL
231	Ikatan Dokter Indonesia
232	Persatuan Guru Republik Indonesia
233	Persatuan Sarjana Hukum Indonesia
234	Persatuan Advokat Indonesia
235	Lembaga Bantuan Hukum
236	Korps pegawai Republik Indonesia
237	Persatuan Wartawan Indonesia
238	Ikatan Arsiparis Indonesia
239	Ikatan Pustakawan Indonesia
240	ORGANISASI PEMUDA
241	Komite Nasional Pemuda Indonesia
242	Organisasi Mahasiswa
243	Organisasi Pelajar
244	Gerakan Pemuda Ansor
245	Gerakan Pemuda Islam Indonesia
246	Gerakan Pemuda marhaenis
247	-
248	-
249	-
250	ORGANISASI BURUH ,TANI DAN NELAYAN
251	Federasi Buruh Seluruh Indonesia
252	Organisasi Buruh Internasional
253	Himpunan Kerukunan Tani Indonesia
254	Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia
255	-
256	-
257	-
258	-
259	-
260	ORGANISASI WANITA
261	Dharma Wanita
262	Kongres Wanita Indonesia
263	Persatuan Wanita Republik Indonesia
264	-
265	-
266	-
267	-
268	-
269	-
270	PEMILIHAN UMUM
271	Pencalonan
272	Tanda Gambar
273	Kampaye

274	Petugas Pemilu
275	Pemilih
276	Sarana
276.1	TPS
276.2	Kendaraan
276.3	Surat Suara
276.4	Kotak Surat
277	Pemungutan Suara
278	Hasil Pemilu
279	KPU
280	Panwaslu
281	Pelanggaran Pemilu
282	Pemantau Pemilu
283	Sengketa Pemilu
284	—
285	—
286	—
287	—
288	—
289	—
290	—
291	—
292	—
293	—
294	—
295	—
296	—
297	—
298	—
299	—
300	KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM
300.1	Kebijakan Pemerintah mengenai situasi dan kondisi keamanan
300.2	Pembinaan dan pengaturan mengenai larangan
300.3	Pencegahan dan penanggulangan gangguan /ancaman keamanan /ketertiban umum
300.4	Program kerja serta tata cara penanggulangan keamanan
300.5	Laporan dari instansi yang berwenang
300.6	Laporan adanya kejadian/unjuk rasa
300.7	Laporan adanya kejadian teroris
300.8	Pengamanan sidang (tamu negara)
300.9	Pengawasan pejabat
301	Kordinasi dan kerjasama keamanan dan ketertiban umum (Trantibum)
302	Pengawasan Trantibum
303	Penegakan pelaksanaan perda
304	Pembinaan / pennyuluhan pelanggaran perda
305	Patroli wilayah
306	—
307	—
308	—
309	—

310	PERTAHANAN
311	Darat
312	Laut
313	Udara
314	-
315	-
316	-
317	-
318	-
319	-
320	KEMILITERAN/TNI
321	Latihan Militer
322	Wajib Militer
323	Operasi Militer
324	Kekaryaan ABRI Pejabat Sipil dari ABRI klasifikasikan Dwifungsi ABRI
325	TMMD (TNI Manunggal Membangun Desa)
326	-
327	-
328	-
329	-
330	KEAMANAN
331	Kepolisian
331.1	Surat Keterangan Catatan Kriminal (SKCK)
331.2	Polisi Pamong Praja/Satpol PP
332	Hura-hura/demonstrasi
333	Senjata Api/Tajam
334	Bahan Peledak
335	Perjudian
336	Surat-surat kaleng, Pengaduan
337	-
338	-
339	-
340	PERTAHANAN SIPIL
340.1	Kebijaksanaan Pemerintah mengenai pembentukan Pertahanan Sipil
340.11	Penganagkatan / Pemberhentian Anggota Linmas
340.12	Pengerahan dan Pengendalian Linmas
340.13	Kegiatan Pelaksanaan Matrik Hansip dan Menwa
340.14	HUT Hansip
340.15	Pembinaan anggota /Linmas
340.16	Penghargaan anggota Linmas
340.17	Hansip/Linmas Lanjut Usia
340.18	Pendidikan / Pelatihan Linmas dan Menwa
340.2	Orientasi Kesadaran Bela Negara bagi tokoh masyarakat
340.21	Pemberian Tali Asih bagi Anggota
340.22	Tar PPBN bagi anggota Satlinmas
340.23	Tar PPBN bagi Aparat Pemda

341
342
343
344
345
346
347
348
349

--
--
--
--
--
--
--
--
--

350
351
352
353
354
355
355.1
355.2
355.3
356
357
358
359

KEJAHATAN
Makar/Pemberontakan
Pembunuhan
Penganiayaan, Pencurian/Perampasan/Perampokan
Subversi/Penyelundupan / Narkotika
Pemalsuan
Uang
Ijazah
Kejahatan pemalsuan lainnya
Korupsi/Penyelewengan/Penyalahgunaan Jabatan
Pemeriksaan/perbuatan cabul
Kenakalan
Kejahatan lainnya

360
361
362
363
364
364.1
365
366
367
368
369

BENCANA
Gunung Berapi/Gempa
Banjir/Tanah longsor
Angin Topan
Kebakaran
Pemadam Kebakaran
Kekeringan dan Air Bersih
Kekeringan dan Lahan
-
-
-

370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386

KECELAKAAN
(klasifikasi disini : SAR)
Latihan SAR anggota Satlinmas/Menwa
Latihan keterampilan Penyelamatan di air dan menyelam
Latihan manajemen PBP bagi pejabat Satkorlak dan Satlak
Gladi Lapangan Satlak PBP
Latihan Manajemen PBP bagi aparat Kesbang dan Linmas
Latihan kemampuan Pusdalop bagi aparat PBP
Latihan Kemampuan PBP bagi Pimpinan Organisasi dan Tokoh Masyarakat
Latihan keterampilan pemadam kebakaran
Latihan Tim Kaji Bencana
Latihan Mitigasi Bencana bagi Satlak PBP Rawan Bencana Banjir dan Tanah Longsor
Kecelakaan lalu lintas jalan raya
Kecelakaan udara
Kecelakaan laut
-
-
-

387 -
388 -
389 -
390 -
391 -
392 -
393 -
394 -
395 -
396 -
397 -
398 -
399 -

400 KESEJAHTERAAN RAKYAT

401 -
402 -
403 -
404 -
405 -
406 -
407 -
408 -
409 -

410 PEMBANGUNAN DESA

411 Pembinaan usaha gotong-royong
411.1 Swadaya gotong-royong
411.11 Penataan gotong-royong
411.12 Gotong-royong dinamis
411.13 Gotong-royong statis
411.14 Pungutan

411.2 Lembaga Sosial Desa (LSD)

411.21 Pembinaan
411.22 Klasifikasi
411.23 Proyek
411.24 Musyawarah

411.3 Latihan Kerja Masyarakat

411.31 Kader masyarakat
411.32 Kuliah Kerja Nyata (KKN)
411.33 Pusat Pelatihan
411.34 Kursus-kursus
411.35 Kurikulum/Sylabus
411.36 Keterampilan
411.37 Pramuka

411.4 Pembinaan Kesejahteraan keluarga (PKK)

411.41 Program
411.42 Pembinaan Organisasi
411.43 Kegiatan

411.5	penyuluhan
411.51	Publikasi
411.52	Peragaan
411.53	Sosio Darma
411.54	Siaran Pedesaan
411.55	Kelompencapir
411.56	Penyuluhan lapangan
411.6	Kelembagaan Desa
411.61	Kelompok Tani
411.62	Rukun Tani
411.63	Subak
411.64	Dharma Tirta
411.65	P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air
412	Perekonomian Desa
412.1	Produksi Desa
412.11	Pengolahan
412.12	Pemasaran
412.2	Keungan Desa
412.21	Perkreditan Desa
412.22	Inventerisasi Data
412.23	Perkembangan/Pelaksanaan
412.24	Bantuan / Simulasi
412.25	Petunjuk/Pembinaan Pelaksanaan
412.3	Koperasi Desa
412.31	Badan Usaha Unit Desa (BUUD)
412.32	Koperasi UsahaUnit Desa (KUD)
412.4	Penataan Bantuan Pembangunan Desa
412.41	Jumlah Desa yang diberi bantuan
412.42	Pengarahan
412.43	Pusat
412.44	Daerah
412.5	Alokasi Bantuan Pembangaunan desa
412.51	Pusat
412.52	Daerah
412.6	Pelaksanaan Bantuan Pembanguna Desa
412.61	Bantuan Langsung
412.62	Bantuan Keserasian
412.63	Bantuan Juara Lomba Desa
413	Prasarana Desa
413.1	Pembinaan
413.11	Bimbingan Teknis
413.2	Pemukiman kembali Penduduk
413.21	Lokasi
413.22	Diskusi
413.23	Pelaksanaan

413.3	Masyarakat Pradesa
413.31	Pembinaan
413.32	Penyuluhan
413.4	Pemugaran Perumahan dan Lingkungan Desa
414.41	Rumah Sakit
414.42	Proyek perintis Pelaksanaan
414.43	Pengembangan
414.44	Perbaikan kampung
414	Pengembangan Desa
414.1	Tingkat perkembangan desa
414.12	Jumlah desa
414.13	Pemekaran desa
414.14	Pembentukan desa baru
414.15	Evaluasi
414.16	Bagian
414.17	Data Desa Tertinggal
414.2	Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP), Musrenbang Kecamatan
414.21	Penyuluhan Program / Fasilitas Program
414.22	Lokasi UDKP
414.23	Pelaksanaan
414.24	Bimbingan / Pembinaan
414.25	Evaluasi
414.3	Tata Desa/Profil Desa dan Kelurahan
414.31	Inventarisasi
414.32	Penyuluhan Pola Tata desa
414.33	Pemetaan
414.34	Pedoman Pelaksanaan
414.35	Evaluasi
414.4	Perlombaan Desa
414.41	Pedoman
414.42	Penilaian
414.43	Kejuaraan
414.44	Piagam
415	Koordinasi
415.1	Sektor Khusus (K)
415.2	Rapat Koodinasi Horisontal
415.3	Tim Koordinasi Pusat (TKP)
415.4	Kerjasama
415.41	Luar negeri (Unicef)
415.42	Perguruan tinggi
415.43	Departemen / Lembaga non Departemen
416	-
417	-
418	-
419	-

420	PENDIDIKAN
421	Sekolah
421.1	Prasekolah
421.2	Sekolah Dasar
421.3	Sekolah Menengah
421.4	Sekolah Tinggi
421.5	Sekolah Kejuruan
421.6	Kegiatan Sekolah Diesnatalis, Lustrum
421.7	Kegiatan Pelajar Reuni, Darmawisata, lomba Klasifikasi disini : Pelajar Teladan, Pertukaran Pelajar
421.8	Sekolah Pendidikan Luar Biasa
421.9	Pendidikan luar sekolah / Pemberantasan buta huruf
422	Administrasi Sekolah
422.1	Persyaratan Masuk Sekolah, Testing, Ujian Pendaftaran, Mapram, Perpeloncoan, OSPEK
422.2	Tahun Pelajaran
422.3	Hari Libur
422.4	Uang Sekolah Klasifikasi disini SPP, BP3
422.5	Beasiswa
422.6	Ijazah
423	Metode Belajar, Wajib Belajar
423.1	Kuliah
423.2	Ceramah, Simposium, seminar
423.3	Diskusi
423.4	Kuliah Lapangan, Widyawisata, KKN
423.5	Kurikulum
423.6	Karya tulis, Karya ilmiah
423.7	Ujian
424	Tenaga Pengajar Guru, dosen, Dekan, Rektor
425	Sarana Pendidikan
425.1	Gedung
425.11	Gedung Sekolah
425.12	Kampus
425.13	Pusat Kegiatan
425.14	Perpustakaan
425.15	Laboratorium
425.2	Buku
425.3	Perlengkapan Sekolah
425.4	Sistem Informasi Pendidikan
426	Keolahragaan
426.1	Cabang Olahraga
426.2	Sarana
426.21	Gedung Olahraga
426.22	Stadion
426.23	Lapangan
426.24	Kolam Renang

- 426.3 Pesta Olahraga
Klasifikasi disini : PON, PORSADA, Olimpiade, PORSENI
- 426.4 Hobby
- 427 Kepemudaan
Meliputi organisasi dan kegiatan remaja klasifikasi disini ; gelanggang remaja
- 428 Kepramukaan
- 429 Pendidikan Kedinasan
Untuk Departemen Dalam Negeri lihat 890
- 430 KEBUDAYAAN**
- 431 Kesenian
- 431.1 Cabang Kesenian
- 431.2 Sarana
- 431.21 Gedung Kesenian
- 431.22 Padepokan
- 431.23 Ganasidi
- 432 Kepurbakalaan
- 432.1 Museum
- 432.2 Peninggalan Kuno
- 432.21 Candi termasuk pemugaran
- 432.22 Benda
- 433 Sejarah
- 434 Bahasa
- 435 Usaha Pertunjukan, Hiburan, Kesenian
- 436 Kepercayaan
- 437 Festival pentas Seni
- 438 -
- 439 -
- 440 KESEHATAN**
- 441 Pembinaan Kesehatan
- 441.1 Gigi
- 441.2 Mata
- 441.3 Jiwa
- 441.4 Kanker
- 441.5 Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)
- 441.6 Perawatan
- 441.7 Penyuluhan Kesehatan Masyarakat (PKM)
- 441.8 Kesehatan Ibu dan Anak
- 441.9 Sistem Kesehatan Nasional
- 441.91 JPS BK (Jaringan Pengamanan Sosial Bidang Kesehatan)
- 442 Obat-obatan
- 442.1 Pengadaan
- 442.2 Penyimpanan
- 442.3 Obat Generik
- 442.4 Pemalsuan
- 442.5 Obat Terlarang

- 443 Pemberantasan Penyakit
- 443.1 Pencegahan
- 443.2 Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Menular Langsung (P.2.M.L)
- 443.21 Kusta
- 443.22 Kelamin, HIV, AIDS, IMS
- 443.23 Frambusia
- 443.24 TBC

- 443.3 Epidemiology dan Karantina (Epidka)
- 443.31 Kholera
- 443.32 Imunisasi
- 443.33 Surveilense
- 443.34 Antrak
- 443.35 Leptosirosis
- 443.36 Chikungunya
- 443.37 SARS

- 443.4 Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Menular Sumber Binatang (P.2.B)
- 443.41 Malaria
- 443.42 Dengue Haemorrhagie Fever (Demam Berdarah, DHF)
- 443.43 Filaria
- 443.44 Serangga
- 443.45 Rabies

- 443.5 Higiene Sanitasi
- 443.51 Tempat-tempat pembuatan dan penjualan makanan dan minuman, jasa boga (TPPMM)
- 443.52 Sarana Air Minum
- 443.53 Pestisida
- 443.54 Pencemaran Udara
- 443.55 Jamban Keluarga
- 443.56 Kesehatan Institusi

- 443.6 Pemberantasan Penyakit tidak menular
- 443.61 A. Pektoris
- 443.62 I M A
- 443.63 Hipertensi
- 443.64 Stroke
- 443.65 Diabetis Militus (DM)
- 443.66 CA. Service
- 443.67 CA. Mammae
- 443.68 CA. Hepar
- 443.69 CA. Paru

- 443.7 DEKOPENSATIOKORDIS
- 443.71 P P O M
- 443.72 Asma
- 443.73 Kecelakaan Lalu Lintas
- 443.74 Psikosis

- 444 GIZI
- 444.1 Kekurangan Makanan
- 444.2 Bahaya Kelaparan, Busung Lapar
- 444.3 Keracunan Makanan
- 444.4 Menu makanan Rakyat
- 444.5 Gondok endemik (GAKY)

- 445 Rumah Sakit
 - 445.1 RSUP
 - 445.2 Rumah Sakit jiwa
 - 445.3 Rumah Sakit Mata
 - 445.4 Puskesmas dan Puskesmas Keliling
 - 445.5 Poliklinik (Balai Kesehatan)
 - 445.6 Rumah Bersalin
 - 445.7 Posyandu
 - 445.8 Rumah Sakit / Balai Kesehatan Lainnya
 - 445.9 Laboratorium Kesehatan

- 446 Tenaga Medis
 - 446.1 Perencanaan dan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan
 - 446.2 Diklat Tenaga Kesehatan (Medis)
 - 446.3 Diklat Tenaga Kesehatan (Paramedis)
 - 446.4 Pendidikan Kesehatan

- 447 Peralatan Kesehatan
 - 447.1 Pengadaan Alat Kesehatan
 - 447.2 Penyimpanan Alat kesehatan
 - 447.3 Standarisasi Alat Kesehatan
 - 447.4 Penghapusan Alat Kesehatan

- 448 Pengobatan tradisional
 - 448.1 Pijat
 - 448.2 Tusuk jarum
 - 448.3 Jamu tradisional
 - 448.4 Dukun

- 449 Perijinan
 - 449.1 Surat Ijin Paktek (SIP)
 - 449.2 Surat Ijin Kerja (SIK)

- 450 **AGAMA**

- 451 Islam
 - 451.1 Peribadatan
 - 451.11 Sholat.
 - 451.12 Zakat, Fitrah
 - 451.13 Puasa
 - 451.14 Haji (jangan diklasifikasikan disini lihat 456)
 - 451.2 RumahIbadah ; Masjid
 - 451.3 Tokoh Agama
 - 451.4 Pendidikan
 - 415.41 Tinggi
 - 415.42 Menengah
 - 415.43 Dasar
 - 415.44 Pondok Pesantren
 - 415.45 Gedung Sekolah
 - 415.46 Tenaga Pengajar
 - 415.47 B u k u
 - 415.48 D a k w a h
 - 415.49 Organisasi / lembaga pendidikan

451.5	Harta Agama Wakaf, Baitamal dsb
451.6	Organisasi keagamaan bukan politik, Majelis Ulama
451.7	Mazhab
452	Protestan
452.1	Peribadatan
452.2	Rumah Ibadat ; Gereja
452.3	Tokoh Agama, Rokhaniawan, Pendeta, Domine
452.4	Mazhab
452.5	Organisasi Gerejani
453	Katholik
453.1	Peribadatan
453.2	Rumah Ibadat ; Gereja
453.3	Tokoh Agama, Rokhaniawan, Pastur
453.4	Mazhab
453.5	Organisasi Gerejani
454	H i n d u
454.1	Peribadatan
454.2	Rumah Ibadat ; Pura
454.3	Tokoh Agama, Rokhaniawan
454.4	Mazhab
454.5	Organisasi PHDI
455	B u d h a
455.1	Peribadatan
455.2	Rumah Ibadat; Vihara
455.3	Tokoh Agama, Rokhaniawan
455.4	Mazhab
455.5	Organisasi
456	Urusan Haji
457	-
458	-
459	-
460	SOSIAL
461	Rehabilitasi Penderita Cacat
461.1	Cacat mata
461.2	Cacat tubuh
461.3	Cacat mental
461.4	Bisu / tuli
462	Tuna Sosial
462.1	Gelandangan
462.2	Pengemis
462.3	Tuna Susila
462.4	Anak nakal
462.5	Tuna wisma
463	Kesejahteraan anak / keluarga
463.1	Anak putus sekolah
463.2	Ibu teladan

- 464 Pembinaan Pahlawan
- 464.1 Pahlawan
Meliputi penghargaan kepada pahlawan, tunjangan kepada pahlawan dan tandanya.
- 464.2 Perintis Kemerdekaan
Meliputi pembinaan, penghargaan kepada pahlawan, tunjangan kepada pahlawan dan tandanya.
- 464.3 Cacat Veteran

- 465 Kesejahteraan Sosial
- 465.1 Lanjut Usia
- 465.2 Korban kekacauan, pengungsian, rehabilitasi

- 466 Sumbangan Sosial
- 466.1 Korban Bencana
- 466.2 Pencarian dana untuk sumbangan
Meliputi : penyelenggaraan undian, ketangkasan, baazar dsb
- 466.3 Panti Asuhan

- 467 Bimbingan Sosial
- 467.1 Masyarakat Suku Terasing
Meliputi: Bimbingan pendidikan, kesehatan, pemukiman, operasi busana dsb

- 468 P M I
- 468.1 Donor Darah

- 469 Makam
- 469.1 U m u m
- 469.2 Pahlawan
- 469.3 Khusus Keluarga, Raja
- 469.4 Krematoruim

- 470 **KEPENDUDUKAN**

- 471 Kewarganegaraan Indonesia
- 471.1 WNI Asli
- 471.2 WNI Keturunan Asing
- 471.21 Permohonan kewarganegaraan
- 471.22 Permohonan ganti nama

- 471.3 Asimilasi

- 472 Kewarganegaraan Asing
- 473 Tidak berkewarganegaraan (state less)

- 474 Pendaftaran Penduduk
- 474.1 Kelahiran
- 474.11 Adopsi

- 474.2 Perkawinan / perceraian / rujuk
- 474.3 Kematian
- 474.4 Kartu Penduduk
- 474.5 Kartu Keluarga

- 475 Trasmigrasi
- 475.1 Penyiapan informasi daerah transmigrasi
- 475.11 Informasi potensi peluang bekerja dan berusaha di daerah transmigrasi
- 475.12 Perbandingan potensi daerah asal dan daerah transmigrasi
- 475.13 Pemasyarakatan / sosialisasi transmigrasi
- 475.14 Peran serta lembaga dan instansi terkait serta media massa dalam penyampaian informasi transmigrasi
- 475.15 Publikasi transmigrasi melalui pameran dan kesenian
- 475.16 Bimbingan dan penyuluhan transmigrasi bagi masyarakat daerah asal dan daerah transmigrasi
- 475.17 Kerjasama di bidang transmigrasi
- 475.18 Kepulangan transmigran karena daerah terjadi konflik
- 475.2 Pemukiman transmigrasi
- 475.21 Penggunaan tanah pemukiman transmigrasi
- 475.22 Pengembangan, struktur wilayah dan analisis data wilayah transmigrasi
- 475.23 Tata ruang satuan kawasan pengembangan, studi kelayakan dan dampak lingkungan transmigrasi
- 475.24 Teknis ruang satuan pemukiman dan lokasi / peta informasi pemukiman
- 475.25 Standarisasi dan spesifikasi teknis rumah transmigran, fasilitas umum/sosial dan jaringan transportasi
- 475.26 Tanah pemukiman, pengadaan areal tanah dan pembebasannya, identifikasi, pengukuran dan pembuatan batas areal tanah
- 475.27 Penyelesaian masalah tanah di lokasi pemukiman transmigrasi
- 475.28 Tata ruang pemukiman transmigrasi
- 475.281 Rancangan dan pemanfaatan areal tanah
- 475.282 Rancangan kapling TSM
- 475.283 Pengukuran dan pembagian lahan pekarangan, lahan usaha dan fasilitas umum
- 475.284 Penyelesaian kekurangan lahan usaha kepada transmigran dan pengembalian lahan kembali dan penggunaan areal tanah
- 475.285 Pengukuran batas unit pemukiman
- 475.286 Pengukuran batas unit pemukiman
- 475.287 Penyelesaian perubahan areal dan urusan perijinan pemanfaatan areal tanah
- 475.29 Pemukiman transmigrasi
- 475.291 Pembinaan dan pengendalian, penyiapan bangunan rumah transmigrasi dan jamban keluarga dan fasilitas umum
- 475.292 Pembinaan dan pengendalian penyiapan sarana air bersih
- 475.293 Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan sumber energi
- 475.294 Pembinaan dan pengendalian peningkatan sarana
- 475.295 Pembinaan, pengendalian dan teknis peningkatan potensi lahan dan lingkungan
- 475.3 Pengerahan, pemindahan dan penempatan
- 475.31 Pengkajian dan pengembangan metode pengerahan dan penempatan
- 475.32 Teknis penyuluhan dan motifasi dalam pengerahan dan penempatan
- 475.33 Pengerahan
- 475.331 Pendaftaran dan seleksi calon transmigran
- 475.332 Berkas persyaratan dan administrasi calon transmigran
- 475.333 Transmigran yang dinyatakan lulus penyaringan
- 475.34 Pemberangkatan transmigran
- 475.341 Pengangkutan transmigrasi melalui laut, udara dan darat
- 475.342 Jadwal dan tempat pelaksanaan pemberangkatan

- 475.343 Pelaksanaan pengurusan pemberangkatan
- 475.344 Pengawalan perjalanan transmigran
- 475.345 Pengaturan rute pemberangkatan
- 475.346 Alokasi penempatan dan surat perintah pemberangkatan

- 475.35 Penempatan transmigran
- 475.351 Kesiapan lokasi dan daya tampung
- 475.352 Pendataan transmigrasi di lokasi yang masih dibina
- 475.353 Data transmigran yang meninggalkan lokasi disetiap UPT
- 475.354 Pemantauan penempatan transmigrasi pengganti

- 475.4 Penampungan transmigrasi (transito), dan pelatihan transmigran
- 475.41 Pelatihan transmigran
- 475.411 Program pengajaran dan metode pelatihan
- 475.412 Penyusunan silabus dan modus pelatihan
- 475.413 Penyusunan calon peserta / pelatih

- 475.42 Penampungan transmigran di transito
- 475.421 Pelayanan kesehatan bagi transmigran
- 475.422 Pelayanan makanan bagi transmigran
- 475.423 Pelayanan perbekalan / peralatan bagi transmigran

- 475.5 Pembinaan masyarakat transmigrasi
- 475.51 Identifikasi dan penjajagan pembinaan
- 475.512 Identifikasi, analisis data pedoman pelaksanaan rencana teknis pembinaan tahap penyesuaian
- 475.513 Identifikasi, analisis data pedoman pelaksanaan rencana teknis pembinaan tahap pengembangan
- 475.514 Identifikasi, analisis data pedoman pelaksanaan rencana teknis pembinaan tahap pembinaan

- 475.52 Pembinaan pendidikan
- 475.521 Penyediaan/penyiapan sarana dan usaha pengembangan pendidikan
- 475.522 Pelaksanaan penyiapan tenaga pendidikan dan status

- 475.53 Pelaksanaan peningkatan partisipasi masyarakat

- 475.54 Pembinaan kesehatan
- 475.541 Penyediaan sarana kesehatan dan KB
- 475.542 Penanggulangan penyakit dan kejadian luar biasa
- Pendistribusian bantuan pangan

- 475.55 Pembinaan rokhani
- 475.551 Bimbingan mental spiritual dan penyediaan petugas agama
- 475.552 Bimbingan adaptasi masyarakat
- 475.553 Bimbingan pelaksanaan menumbuhkan interaksi sosial

- 475.56 Pelayanan pos di daerah transmigrasi
- 475.57 Penyerahan UPT yang layak untuk diserahkan
- 475.58 Penilaian transmigran teladan
- 475.59 Pemantauan dan penilaian kelayakan usaha
- 476 Keluarga Berencana
- 476.1 Alat kontrasepsi
- 476.2 KB Lestari
- 476.3 KB Mandiri

476.4	Penyuluh Lapangan KB (PLKB)
476.5	Pos KB desa
476.6	Akseptor KB
477	Catatan Sipil
478	-
479	-
480	MEDIA MASSA
480.1	Penerbitan
481.11	Surat Kabar
481.12	Majalah
481.13	Buletin
481.14	Klarifikasi Berita
481.15	Press Reliase
481.16	Layanan Informasi / Leaflet
481.17	Masukan Analisis Gubernur
481.18	Jurnal Mingguan Ringkasan Berita
481.19	Jurnal Mingguan Pendapat Umum
480.2	Liputan Media Massa
481.21	Liputan Rutin
481.22	Liputan Khusus
481.221	Arus Lebaran
481.222	Pemberangkatan dan Kepulangan Haji
480.3	Pencabutan Surat Ijin
481.31	Surat Kabar
481.32	Majalah
481.33	Buletin
480.4	Laporan dan Hasil Pemberitaan
481.41	Surat Kabar
481.42	Majalah
481.43	Buletin
481.44	Kegiatan Bidang
481.45	Grafika
482	Media Elektronik
482.1	RRI
482.2	Non RRI
482.3	ORARI
482.4	R A P I
482.5	T V R I
482.6	TV Swasta
482.7	Film
483	Reklame
483.1	Ketentuan Pemasangan
483.2	Penerbitan
483.3	Pameran Non Komersial

- 484 Kewartawanan
- 484.1 Pembentukan Organisasi Profesi
- 484.2 Terjadinya Kasus Penghinaan, Pemukulan, Penganiayaan Terhadap Wartawan
- 484.3 Penyalahgunaan Profesi
- 484.4 Bantuan Kepada / Dari Organisasi Profesi Wartawan
- 484.5 Musyawarah Wartawan Indonesia
- 484.6 Kebijakan Pimpinan Wartawan / Pendidikan Jurnalistik
- 484.7 Temu Pers/Konferensi Pers
- 484.8 Pers Tour
- 484.9 Wawancara/Audiensi Wartawan

- 485 Penerangan
- 485.1 Publikasi
- 485.2 Pendirian Information Center

- 486 Peningkatan Kapasitas Bidang Inforkom
- 486.1 Training Foto Grafi
- 486.2 Training Berita Jurnalistik
- 486.3 Bintek Infokom
- 486.4 Rakorda Infokom
- 486.5 Rakor Pengendalian Kegiatan

- 487 Hubungan Antar Lembaga
- 487.1 Organisasi Kemasyarakatan
- 487.12 Wahana Komunikasi Masyarakat
- 487.13 Bintek Pengurus LKM
- 487.14 Bahan Informasi Cetak LKM
- 487.15 Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Media
- 487.16 Pelatihan Motivator Kapa Narkoba
- 487.17 Pembekalan LSM/Upaya PPBN
- 487.18 Bahan Informasi Sosialisasi PPBN

- 487.2 Lembaga Pemerintah
- 487.21 Pertemuan Bakohumas
- 487.22 Pertemuan kehumasan
- 487.23 Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID)

- 487.3 Luar Negeri
- 487.31 Promosi Luar Negeri
- 487.32 Kunjungan Wartawan Asing

- 488 Fasilitas peningkatan Pelayanan Infomasi
- 488.1 Pembuatan Foto Blow Up Slide
- 488.2 Tayangan Udara tentang Kebijakan dan Hasil Pembangunan
- 488.21 Kran Info Grhadika
- 488.22 Halo Gubernur
- 488.23 Fokus Utama

- 488.3 Pelayanan Informasi Melalui Feature

- 488.4 Pelayanan Informasi Melalui Spot
- 488.41 Televisi
- 488.42 R a d i o

488.5	Pelayanan Informasi Melalui Media Tradisional
488.51	Karawitan
488.52	Wayang Kulit
488.53	Guyon Maton
488.6	Dialog Interaktif
488.61	Televisi (TVRI), Nasional
488.62	R a d i o
489	Sistem Naskah Sosialisasi Kegiatan Gubernur
489.1	Himpunan Naskah Sambutan
489.2	Klasifikasi Naskah Sambutan
489.3	Himpunan Dialog Interaktif
489.4	Himpunan Naskah Rubrik
489.5	Himpunan Naskah Keynote Speaker
489.6	Pembuatan Kolom Khusus Hasil-Hasil Pembangunan
490	--
491	--
492	--
493	--
494	--
495	--
496	--
497	--
498	--
499	--
500	PEREKONOMIAN
500.1	Dewan Stabilisasi
501	Pengadaan Pangan
502	Pengadaan Sandang
503	Perizinan pada umumnya. Untuk perizinan suatu bidang, klasifikasi pada masalahnya.
504	
505	
506	
507	
508	
509	
510	PERDAGANGAN
	Klasifikasi dalam perdagangan
510.1	Monopoli perdagangan
510.11	Pekan Raya
510.12	Iklan
510.13	Pameran
510.14	Event-event
510.15	Lomba-lomba (lomba desain, busana, kerajinan)
510.16	Pasar
510.17	Pertokoan, kios, PKL
510.2	Pelelangan, Distribusi
510.21	Pemasaran Sembako
510.22	Pemasaran hasil Industri

510.23	Penentuan Harga Pokok
510.3	Bina Usaha dan Sarana Perdagangan
510.31	Rencana dan program Kerja
510.32	Pelaksanaan Pelayanan Administrasi
510.33	Pelaksanaan Teknis
510.34	Pemantauan
510.35	Evaluasi dan Pelaporan
510.4	Perijinan
510.41	Penerbitan SIUP
510.42	Perpanjangan
510.43	Ijin prinsip
510.44	Rekomendasi
510.5	Perdagangan antar Pulau
510.51	Kerjasama bahan baku
510.52	Industri pemasaran
510.53	Kontrak
510.6	T e r a
510.61	Tera Ulang Ukuran
510.62	Takaran
510.63	Timbangan
510.64	Kalibrasi
510.65	Cap tanda tera
510.66	Biaya tera
510.7	Bantuan Peralatan
510.71	Proposal
510.72	Surat perjanjian / kontrak
510.73	Serah terima
510.8	Perijinan / Rekomendasi Tanda Pabrik
510.9	Kemetrologian
510.91	Standar Tingkat tiga
510.92	Standar Kerja Satuan Ukuran
510.93	Ukuran Metrologi
510.931	Peralatan
510.932	Laboratorium Metrologi
510.933	Tanki Ukur Mobil
510.934	Meter Taxi
510.935	KWH Meter
510.936	S P B U
511	Pemasaran
511.1	Sembilan bahan pokok,
511.2	P a s a r
511.3	Pertokoan, kaki lima, kios
511.4	Pusat perbelanjaan

- 512 Ekspor
 - 512.1 Ekspor Hasil Industri
 - 512.2 Ijin Ekspor
 - 512.3 Pengembangan Pasar Luar Negeri
 - 512.4 Managemen Perdagangan Internasional
 - 512.5 Ekspor Hasil Industri
 - 512.51 Kebijakan
 - 512.52 Pemasaran

- 512.6 Pemberitahuan Eksport Barang
- 512.7 Pengawasan Mutu Barang
- 512.8 Eksportir Terdaftar
- 512.9 Evaluasi dan Pelaporan

- 513 Impor
 - 513.1 Ijin Import
 - 513.11 Pemberian Ijin
 - 513.12 Pengendalian Ijin

- 513.2 Standart Mata Dagang Import
- 513.3 Managemen Perdagangan Internasional

- 513.4 Kegiatan Import
 - 513.41 Pembinaan Import
 - 513.42 Pengendalian Import
 - 513.43 Pemantauan Import

- 513.5 Faktor-faktor Pendukung
- 513.6 Pengawasan Mutu Barang Import

- 513.7 Penyaluran Kegiatan Import
 - 513.71 Bahan Konsumsi
 - 513.72 Bahan Baku
 - 513.73 Bahan Penolong

- 513.8 Evaluasi dan Pelaporan kegiatan Import

- 514 Perdagangan Antar Pulau
 - 514.1 Kerjasama Bahan Baku
 - 514.2 Industri Pemasaran
 - 514.3 Kontrak

- 515 Perdagangan Luar Negeri
 - 515.1 Pengembangan Potensi Luar Negeri
 - 515.11 Promosi dan Informasi
 - 515.12 Pameran
 - 515.13 Kerjasama

- 516 Pergudangan
 - Termasuk tangki penyimpanan minyak goreng
 - 516.1 Peti kemas
 - 516.2 Tangki Penyimpanan

- 517 Aneka Usaha Perdagangan

518	Koperasi (Untuk BUUD, KUD Lihat : 412.3 - 412.32)
518.1	Bina Usaha Koperasi
518.11	Koperasi Pertanian dan Perkebunan
518.111	Koperasi Pertanian Tanaman Pangan
518.112	Koperasi Perkebunan
518.12	Koperasi Perikanan dan Peternakan
518.121	Koperasi Perikanan
518.122	Koperasi Peternakan
518.13	Permodalan Koperasi
518.131	Pemupukan Modal
518.132	Pemanfaatan Modal
518.133	Perbankan dan Asuransi
518.134	Permodalan Luar Koperasi
518.135	Kredit Program Umum
518.136	Kredit Program Khusus
518.14	Distribusi dan Jasa Koperasi
518.141	Distribusi Bahan Pokok
518.142	Distribusi Aneka Bahan
518.143	Distribusi Kerjasama Niaga
518.144	Jasa Angkutan
518.145	Jasa Perumahan
518.146	Aneka Jasa
518.15	Koperasi Kelistrikan, Industri dan Telekomunikasi
518.151	Koperasi Kelistrikan
518.152	Koperasi Industri
518.153	Koperasi Telekomunikasi
518.2	Bina Lembaga Koperasi
518.21	Organisasi Koperasi
518.211	Anggaran Dasar dan Akte Pendirian Koperasi
518.212	Pemberian Badan Hukum Koperasi
518.213	Penyelesaian Pembubaran Koperasi
518.214	Perangkaan Koperasi
518.215	Pengakuan Koperasi Sekolah
518.216	Amalgamasi
518.217	Tertib Organisasi Koperasi
518.218	Penyelesaian Perselisihan/ Persengketaan
518.219	Bimbingan Kesadaran Hukum
518.22	Bina Hubungan Alat Kelengkapan Organisasi Koperasi
518.221	Rapat Anggota Koperasi
518.222	Pengurus dan Badan Pemeriksa
518.223	Hubungan dengan Dewan Koperasi Indonesia
518.224	BPP KUD
518.23	Bina Tata Laksana Koperasi
518.231	Klasifikasi KUD
518.232	Klasifikasi Koperasi Perkotaan
518.233	Klasifikasi Koperasi Sekunder
518.234	Klasifikasi KUD Mandiri

518.24	Administrasi Ketatalaksanaan Koperasi
518.241	Administrasi KUD
518.242	Administrasi Koperasi Perkotaan
518.243	Karyawan/Manager Koperasi
518.244	Sumber Daya Manusia
518.245	T K S T
518.246	Penyaluran Alat Sekolah
518.247	Bantuan Pemda kepada Koperasi/KUD
518.25	Akuntansi
518.251	Akuntansi KUD
518.252	Akuntansi Koperasi Perkotaan
518.253	Akuntansi Koperasi Sekunder
518.26	Pengawasan Koperasi
518.261	Pengawasan Koperasi Primer
518.262	Pengawasan Koperasi Sekunder
518.263	Koperasi Jasa Audit
518.264	Kerjasama Kantor Akuntan
518.27	Penyuluhan Koperasi
518.271	Pembinaan Kader Koperasi
518.272	Masyarakat Umum
518.273	Forum Komunikasi
518.274	Kelompok Tani
518.275	P K K L
518.276	Penilaian Tingkat Nasional
518.3	U K M (Usaha Kecil Menengah)
518.31	Pembinaan Usaha
518.311	Pembinaan Usaha Kecil
518.312	Pembinaan Usaha Menengah
518.32	Kredit Usaha
518.321	Kredit Usaha Kecil
518.322	Kredit Usaha Menengah
518.33	Pengawasan Usaha
518.331	Pengawasan Usaha Kecil
518.332	Pengawasan Usaha Menengah
519	-
520	PERTANIAN Tanaman Pangan
521.1	Rencana dan Program
521.11	Bimas/ Inmas Termasuk Kredit
521.12	Pelaporan dan Evaluasi Pertanian
521.2	Produksi
512.21	Padi
512.211	Sawah
512.212	G o g o

512.213	H u m a
521.22	Palawija
521.221	Kacang
521.222	Jagung
521.223	Ketela Pohon
521.224	Ubi-ubian
521.225	Kedelai
521.23	Hortikultura
521.24	Sayuran
521.25	Buah-buahan
521.26	Tanaman Hias
521.27	Perlebahan
521.28	Panen Gagal (Puso)
521.3	Sarana Usaha Pertanian
521.31	Peralatan
521.32	Meliputi traktor dsb
521.33	Pembibitan
521.34	Pupuk
521.35	Irigasi Pertanian
521.36	Rehabilitasi lahan Pertanian
521.4	Perlindungan tanaman
521.41	Penyakit
521.411	Penyakit Daun
521.412	Penyakit Batang
521.42	H a m a
521.421	Hama Serangga, diklasifikasikan : wereng, walang sangit, tungro
521.422	Hama Tikus dan sejenisnya
521.43	Pemberantasan
521.44	Pestisida
521.5	Tanah Pertanian Pangan
521.51	Persawahan
521.52	Perladangan
521.53	K e b u n
521.6	Pengusaha, Petani
521.7	Lahan Kritis/ KTA
521.8	Pemasaran
521.81	Promosi
521.9	Pengembangan Sumber Daya Pertanian
522	Kehutanan
522.1	Perencanaan Hutan
522.11	Survey
522.111	Survey PPA
522.112	Survey Areal
522.113	Survey Pembinaan Hutan
522.114	Survey Potensi Hutan

522.12	Pendataan Areal
522.121	Data Areal Tata Guna Hutan
522.122	Data Areal Konservasi
522.2	Tata Guna Hutan
522.21	Tata Kawasan
522.211	Pengurusan Kawasan Hutan
522.212	Penafsiran Hutan
522.213	Mutasi Hutan
522.22	Tata Hutan
522.221	Tata Hutan Sementara
522.222	Tata Hutan Tetap
522.223	Pembukaan Hutan
522.23	Ukur dan Pemetaan
522.231	Pengukuran
522.232	Perpetaan
522.3	Pengusahaan Hutan
522.31	Data Areal HPH
522.311	Areal HPH
522.312	SKHPH
522.313	Kerjasama
522.314	Pembatalan/Penolakan
522.32	Modal dan Peralatan
522.321	Inventarisasi Logging
522.322	Inventarisasi Industri
522.323	Peralatan
522.324	Tenaga Kerja Pengusahaan Hutan
522.325	Pemegang Saham
522.326	Neraca perusahaan
522.33	Rencana Kerja
522.331	KHPH
522.332	RKPH
522.333	Rencana kerja Lima Tahun RKPH
522.34	Perpanjangan HPH
522.35	Produksi
522.351	Target Produksi
522.352	Produksi Kayu
522.353	Produksi Non Kayu
522.36	Industri
522.361	Industri Kayu HPH
522.362	Industri Kayu Non HPH
522.363	Industri Non Kayu
522.37	Pembinaan HPH
522.371	Pelanggaran dan Sanksi

522.38	Pembangunan Hutan Tanaman Industri
522.381	Hutan Tanaman Industri Pulp
522.382	HTI Pertukangan
522.39	Iuran Hutan
522.4	Sarana Usaha
522.41	Standarisasi
522.411	Kayu
522.412	Non Kayu
522.42	Pengujian Hasil Hutan
522.43	Pengembangan
522.431	Pengembangan Perusahaan
522.432	Pengembangan Pemasaran
522.44	Pemasaran Hasil Hutan
522.45	Angkutan Hasil Hutan
522.451	Sarana dan Prasarana
522.452	Pembinaan dan Peningkatan Daya Hutan
522.46	Tata Usaha Hasil Hutan
522.5	Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam
522.51	Konservasi Jenis
522.511	Satwa yang dilindungi
522.512	Satwa yang tidak dilindungi
522.513	Lembaga konservasi satwa
522.514	Lembaga konservasi tumbuhan
522.52	Kawasan Konservasi
522.521	Cagar Alam (termasuk laut)
522.522	Suaka Margasatwa
522.523	Taman Wisata (termasuk laut)
522.524	Taman Nasional
522.525	Taman Hutan Raya
522.526	Taman Baru
522.527	Hutan Lindung
522.53	Pengkajian Lingkungan
522.531	Amdal UKL, UPL Di Dalam Kawasan Hutan
522.532	Amdal UKL, UPL Di Luar Kawasan Hutan
522.54	Bina Cinta Alam
522.541	Kelompok Pecinta Alam
522.542	Kader Konservasi Sumber Daya Alam
522.543	Penyuluh Konservasi Sumber Daya Alam
522.544	LSM Lingkungan
522.55	Pengamanan Hutan
522.551	Jaga Wana
522.552	PPNS

522.553	Gangguan Keamanan Hutan
522.554	Bencana Alam
522.555	Kebakaran Hutan
522.556	Sengketa Hutan
522.557	Hama dan Penyakit
522.558	Pestisida dan Pupuk Tanaman Hutan
522.559	Alat dan Mesin Kehutanan
522.6	Rehabilitasi Hutan
522.61	Pembenihan
522.611	Pengumpulan Benih
522.612	Pengadaan Benih
522.613	Pengujian dan Penyimpanan Benih
522.614	Lalu Lintas Angkutan Benih
522.615	Pembibitan
522.616	Pengadaan dan Penedar Bibit Bersertifikat
522.617	Pengadaan dan Penedar Bibit Tidak Bersertifikat
522.62	Tanaman Reboisasi
522.621	Lahan Kritis
522.622	Reboisasi lahan HPH
522.623	Rehabilitasi Tanah Hutan
522.624	Konservasi Tanah dan Air
522.625	Pengendalian Perladangan
522.626	Penghijauan
522.627	Aneka Usaha Kehutanan
522.63	Perhutanan Sosial
522.631	Sutera Alam
522.632	Minyak Kayu Putih
522.633	Perlebahan
523	Perikanan dan Kelautan
523.1	Rencana dan Program
523.11	Penyuluhan
523.12	Teknologi
523.2	Produksi Perikanan
523.21	Pelelangan
523.22	Standarisasi Mutu Hasil Perikanan
523.3	Usaha Perikanan
523.31	Pembibitan
523.32	Daerah Penangkapan
523.33	Perizinan Pembudidayaan Ikan
523.4	Pemasaran
523.41	Eksport Komoditas Perikanan
523.5	Sarana Perikanan
523.51	Peralatan
523.52	Kapal
523.53	Pelabuhan
523.6	Pengendalian Hama dan Penyakit

523.7	Pengusaha, Nelayan
523.71	Kapal/Motor Boat
523.72	Jaring
523.73	Cold Storage
523.74	Tempat Es
523.8	Konservasi dan Suaka Laut
524	Peternakan
524.1	Produksi
524.11	Susu Ternak Rakyat
524.12	Telor
524.13	Daging
524.14	Sarang Burung
524.2	Sarana Usaha Peternakan
524.21	Pembibitan
524.22	Obat Hewan
524.23	Alsinak
524.24	Pakan
524.3	Kesehatan Hewan
524.31	Penyakit Hewan
524.32	Pos Kesehatan Hewan
524.33	Pemeriksaan Spesimen
524.34	Karantina
524.4	Pelayanan Usaha dan Pemasaran
524.41	Promosi Produksi Peternakan
524.42	Pemasaran Peternakan
524.43	Ijin Usaha Peternakan
524.5	Pengawasan dan Standarisasi
524.51	Rumah Potong Hewan
524.52	Laboratorium
524.53	Standarisasi Bibit Ternak
524.6	Pengembangan Peternakan
524.61	Inseminasi Buatan
524.62	Pembibitan
524.63	Kawasan Peternakan
524.64	Penyebaran Ternak
524.7	Data dan Informasi
524.71	Data Peternakan
524.72	Informasi Peternakan
524.8	Organisasi Peternakan
524.81	Asosiasi Peternakan
524.82	Kelompok Tani Ternak
525	Perkebunan
525.1	Rencana dan Program

525.2	Produksi
525.21	Karet
525.22	T e h
525.23	Tembakau
525.24	T e b u
525.25	Cengkeh
525.26	Kelapa/Kopra/Kelapa Sawit
525.27	K o p i
525.28	Aneka Tanaman
525.3	Usaha Perkebunan
525.31	Pembibitan
525.4	Perlindungan Tanaman
525.41	H a m a
525.42	Pestisida
525.43	Pupuk
525.5	Alat dan Mesin Perkebunan
525.6	Pengolahan Lahan
525.61	Terasiring
526	Ketahanan Pangan
526.1	Program Bimbingan Massal
526.2	Pengembangan Sarana Sumber Daya
526.21	Pembinaan Teknologi
526.22	Sarana Produksi dan Permodalan
526.23	Kelembagaan
526.3	Agribisnis
526.31	Mutu Hasil
526.32	Pengelolaan Hasil Pangan
526.33	Pemasaran Hasil
526.34	Kemitraan
526.4	Distribusi Pangan
526.41	Sistem dan Pola Distribusi
526.42	Sarana dan Prasarana Distribusi
526.43	Pengadaan dan Cadangan Pangan
526.5	Kewaspadaan dan Keanekaragaman Pangan
526.51	Rawan Pangan, Keamanan dan Mutu Pangan
526.52	Pola Konsumsi Pangan Masyarakat
526.53	Sistem Informasi Pangan
527	—
528	—
529	—
530	PERINDUSTRIAN
530.1	Undang-undang Gangguan
531	Industri Logam
532	Industri Mesin / Elektronik
533	Industri Kimia / Farmasi
534	Industri Tekstil
535	Industri Makanan / Minuman

536	Aneka Industri / Perusahaan
536.1	Home Industri
537	Aneka Kerajinan
537.1	Kerajinan Rakyat
538	Usaha Negara
538.1	Perjan
538.2	Perum
538.3	Persero
539	Perusahaan Daerah
539.1	PDAM
539.2	Percetakan Daerah
539.3	Apotik Daerah
539.4	Bank Pasar
539.5	PD BPR/BKK
540	PERTAMBANGAN / KESAMUDRAAN
541	Minyak Bumi / Bensin
541.1	Pengusahaan , SPBU
541.11	Eksplorasi
541.12	Kontrak Kerja
541.13	Pengolahan
541.2	Penyaluran
541.3	Tangki, Pompa, Tanker
542	Gas Bumi
543	Logam Mulia (Intan, Emas, Perak)
544	Logam
544.1	Timah
544.2	Aluminium, Boxit
544.3	Besi, termasuk Besi Tua
544.4	Tembaga
545	Aneka Tambang/ Bahan Galian
545.1	Air Permukaan
545.2	Air Bawah Tanah
545.21	Perijinan
545.211	Sumur Artetis
545.212	Sumur Bor
545.213	Sumur Gali/Pasak
545.214	Mata Air
545.215	Pengusaha, Pengebor (APPATINDO)
545.22	Sumur Pantau
545.23	Pemasangan/Penyegelan Water Mater
545.24	Produksi/ Nilai Perolehan Air (NPA)
545.25	Pengawasan, Pengendalian, Pembinaan
546	Geologi
546.1	Vulkanologi
546.11	Pengawasan Gunung Berapi

- 546.2 Sumber Daya Mineral
- 546.3 Vulkanologi
546.31 Pengawasan Gunung Merapi
546.32 Panas Bumi
- 546.4 Hidrogeologi
546.5 Gerakan Tanah (Longsoran, Amblesan)
546.6 Pengawasan, Pengendalian
- 547 Hidrologi
548 Kesamudraan
549 -
- 550 PERHUBUNGAN**
- 551 Perhubungan Darat
551.1 Lalu Lintas Jalan Raya, Sungai, Danau
551.11 Keamanan Lalu Lintas, Rambu – Rambu
551.12 Uji Kelayakan Kendaraan Bermotor (Keur)
551.13 Kecelakaan Lalu Lintas
- 551.2 Angkutan Jalan Raya
551.21 Perizinan
551.22 Terminal
551.23 Alat Angkutan
551.24 Jembatan Timbang/Lebih Muatan
551.25 Uji Mutu
- 551.3 Angkutan Sungai
551.31 Keselamatan, Rambu-Rambu
551.32 Lalu Lintas
551.33 Alur dan Kolam Pelabuhan
551.34 Trayek
551.35 Sarana/Kapal
551.36 Pelabuhan
551.37 Terminal
551.38 Kecelakaan
551.39 Perizinan
- 551.4 Angkutan Danau
551.41 Keselamatan, Rambu-Rambu
551.42 Lalu Lintas
551.43 Alur dan Kolam Pelabuhan
551.44 Trayek
551.45 Sarana/Kapal
551.46 Pelabuhan
551.47 Terminal
551.48 Kecelakaan
551.49 Perizinan
- 551.5 Feri
551.51 Sarana dan Prasarana / Kapal
551.52 Terminal
551.53 Pelabuhan

551.54	Trayek
551.55	Angkutan Penumpang, Angkutan Barang
551.56	Keselamatan
551.57	Kecelakaan
551.58	Perawatan/Perbaikan
551.59	Perizinan
551.6	Perkerata-Apian
551.61	Sarana meliputi Lokomotif, Gerbong, Bogie
551.62	Prasarana (Jalan/Jembatan)
551.63	Trayek
551.64	Angkutan Penumpang
551.65	Angkutan Barang
551.66	Keselamatan
551.67	Kecelakaan
551.68	Perawatan/Perbaikan
551.69	Perizinan
552	Perhubungan Laut
552.1	Lalu Lintas Angkutan Laut
552.11	Pelayaran dalam Negeri
552.12	Pelayaran Luar Negeri
552.13	Pelayaran Haji
552.14	Pelayaran Charter/Wisata Turis
552.15	Pelayaan Khusus
552.16	Keamanan Lalu Lintas, Rambu-Rambu
552.2	Perkapalan – Alat Angkutan
552.21	Kapal Penumpang
552.22	Kapal Barang
552.23	Kapal Perang/Patroli/Negara
552.24	Kapal Tanker
552.25	Ponton/Tongkang
552.26	Kapal Layar
552.27	Kapal Layar Motor
552.28	Kapal Kontainer
552.3	Pelabuhan
552.31	Tanah/Lokasi
552.32	Alur Layar
552.33	Dermaga
552.34	Terminal Penumpang
552.35	Terminal Kontainer
552.36	Bangunan / Gedung/ Gudang
552.37	Perlengkapan Tambat Labuh
552.38	Lapangan Penumpukan
552.39	Pelabuhan Khusus/ Dermaga Khusus
552.4	Pengerukan/ Perawatan
552.41	Alur Pelayaran
551.42	Kolam Pelabuhan
551.43	Reklamasi Pantai
551.44	Dumping Area
551.45	Pekerjaan Bawah Air (Salvage)

552.5	Penjagaan Pantai
552.51	Patroli Bandar
552.52	Patroli Perairan
552.53	Penjagaan Pantai & Penanggulangan Keselamatan di Laut (GAMAT)
552.6	Angkutan Barang
551.61	P o s
551.62	Minyak
551.63	Log
551.64	Ternak
551.65	Sembilan Bahan pokok
551.66	Peti Kemas / EMKL
551.67	Muatan Umum
551.68	Barang Dalam Negeri, Barang Luar Negeri
551.69	Bongkar Muat
552.7	Keselamatan
552.71	Ranbu-Rambu/Mercusuar
552.72	Kelaikan Kapal/Pembangunan Kapal
552.73	Fasilitas Keselamatan / Keamanan
552.74	Telekomunikasi Pelayaran
552.75	Serifikasi kesempurnaan Kapal
552.76	Serifikasi Awak Kapal
552.8	Kecelakaan Gangguan
552.81	Kecelakaan Penumpang / kapal
552.82	Kecelakaan Barang
552.83	Gangguan Sarana /Prasarana
552.84	Pembajakan/Penyelundupan
552.85	Pencemaran
552.9	Perijinan
552.91	Ijin Berlayar
552.92	Ijin pekerjaan Bawah Air
552.93	Ijin pembuatan dan perubahan Bentuk kapal
552.94	Ijin Pembukaan kantor Cabang
552.95	Ijin usaha Angkutan Laut
552.96	Ijin Usaha penunjang angkutan laut
552.97	Ijin Pelayanan jasa kepelabuhan
552.98	Ijin Pembangunan pelabuhan kusus
552.99	Ijin Pembangunan Dermaga Daerah
553.1	Perhubungan Udara
553.11	Lalu Lintas Angkutan Udara
553.12	Penerbangan Domestik
553.13	Penerbangan luarnegeri
553.14	Penerbangan Haji
553.15	Penerbangan Charter/Non Reguler
553.16	Penerbangan Khusus/Jembatan udara
553.2	Pelabuhan Udara
553.21	Tanah/Lokasi
553.22	Landasan
553.23	Apron
553.24	Terminal Penumpang

553.25	Terminal Cargo
553.26	Bangunan/ Gedung
553.27	Perlengkapan
553.28	Parkir Kendaraan
553.3	Alat Angkutan
553.31	Pesawat Udara
553.32	Helikopter
553.4	Angkutan Barang
553.41	P o s
553.42	Muatan Dalam Negeri
553.43	Muatan Luar Negeri
553.44	E M P U
553.5	Sertifikasi Kelaikan
553.51	Kelaikan Pesawat Udara
553.52	Kelaikan peralatan Penunjang
553.53	Kelaikan Personil/Awak kapal
553.6	Keselamatan
553.61	Rambu-Rambu
553.62	Perakitan /Kalibrasi
553.63	Fasilitas keselamatan
553.64	Telekomunikasi Penerbangan
553.7	Kecelakaan / Gangguan
553.71	Kecelakaan Penumpang
553.72	Kecelakaan Barang
553.73	Gangguan Sarana/Prasarana
553.74	Pembajakan
553.75	Pencemaran
553.8	Umum
553.81	Asuransi
553.82	Asosiasi
553.83	S A T P A M
553.84	Rally Udara/Lomba
553.9	Perijinan
553.91	Izin Terbang / Flight Approval
553.92	Usaha Kegiatan Penunjang penerbangan / E M P U
553.93	Pembukaan Kantor Cabang
553.94	Rekomendasi Ketinggian Bangunan
553.95	Pembangunan Bandar Udara Khusus
554	P O S
554.1	Pembinaan
554.11	Kebutuhan Fasilitas
554.12	Rehabilitasi/Perawatan
554.13	Bina Usaha / pengawasan / penertiban
554.14	Standarisasi Perangkat
554.15	Tanah Bangunan
554.16	Filateli
554.17	Asosiasi
554.18	Laporan dan Evaluasi

554.2	Pelayanan
554.21	Jasa Pos
554.22	Jasa Titipan
554.23	Jasa Giro
554.24	Benda pos/Perangko
554.25	Sampul Peringatan
554.26	Jasa Pos Elektronik
554.3	Perijinan
554.31	Rekomendasi Usaha Jasa Pos/Titipan
554.32	Pembukaan Agen /Cabang
554.4	Gangguan Sarana dan prasarana
554.41	Kecelakaan
554.42	Sabotase
554.43	Penyelundupan
555	Telekomunikasi
551.1	Telepon
555.11	Tetap
555.12	Bergerak
555.13	Wartel
555.14	IKR/G
555.2	U S O
555.3	Telegram, Telex / SBB
555.4	Satelit
555.5	Stasiun bumi
555.6	Faximile
555.7	Frekwensi dan Informatika
555.71	Amatir Radio
555.72	KRAP
555.73	Radio Siaran Lokal
555.74	Televisi Siaran Lokal
555.75	Radio Konsesi Lokal
555.76	Radio Base Station
555.77	ISPU (Internet Service Providen)
555.78	Warnet
555.8	Pembinaan / Penertiban / Pengawasan
555.81	Wartel
555.82	Frekwensi Radio Lokal
555.9	Standarisasi Perangkat Telekomunikasi
555.91	Perizinan
555.92	Amatir Radio
555.93	K R A P
555.94	Radio Siaran Lokal
555.95	Televisi Siaran Lokal
555.96	Radio Konsesi Lokal
555.97	Radio Base Station

556	Pariwisata dan Rekreasi
556.1	Usaha Pariwisata
556.11	Usaha Jasa pariwisata
556.111	Usaha Jasa Biro Perjalanan Wisata, Agen Perjalanan Wisata, Pramuwisata, Kovensi, Perjalanan Insentif dan Pameran, Impresariat, Konsultan Pariwisata dan Informasi Pariwisata
556.12	Izin Usaha Obyek dan Atraksi Wisata
556.13	Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata, Meliputi Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata, Wisata Budaya dan Wisata Minat Khusus
556.14	Usaha Sarana Pariwisata, Meliputi Usaha Akomodasi, Makan dan Minum, Angkutan Wisata, sarana Wisata Tirta dan Kawasan Pariwisata
556.141	Ijin Pariwisata
556.142	Ijin Usaha Pariwisata
556.143	Ijin Usaha Jasa Pariwisata
556.144	Ijin Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata
556.145	Ijin Usaha Sarana
556.15	Wisatawan
556.151	wisatawan Nusantara
556.152	Wisatawan Mancanegara
556.16	Promosi dan Informasi Pariwisata
556.161	Dalam Negeri
556.162	Luar Negeri
556.2	Perhotelan
556.21	Status Hotel
556.22	Kelas Hotel
556.23	T a r i f
556.3	Travel Service
556.31	Pramu Wisata
556.32	Biro perjalanan / Angkutan Wisata
556.33	Souvenir
556.34	Kemudahan wisata (Visa, Bea Cukai, Karantina)
556.4	Tempat Rekreasi
556.41	Obyek dan Daya Tarik Wisata
556.411	Ciptaan Tuhan
556.412	Hasil Karya Manusia
556.42	Rehabilitasi/Perawatan
556.43	Pengembangan fasilitas
556.44	Tanah/bangunan
556.45	Bina Usaha
556.46	Institusi
556.461	Asosiasi
556.462	Lembaga Kepariwisataaan
557	Metereologi
557.1	Curah Hujan
557.2	Hujan Buatan
557.3	Penoropongan Bintang
558	—
559	—

560	TENAGA KERJA
560.1	Data Permintaan TKI/TKW Dari luar Negeri
560.11	Data Persediaan TKI/TKW Dari Daerah
560.2	Job Order TKI Keluar Negeri Oleh PJTKI
560.3	Rekrutmen Calon TKI / TKW
560.4	Seleksi Naker Keluar Negeri
560.41	Pendaftaran Dan Seleksi Calon TKI / TKW
560.42	Berkas Persyaratan Calon TKI / TKW
560.43	Pemeriksaan dan Hasil Cek kesehatan TKI / TKW
560.5	Persyaratan Naker TKI / TKW
560.51	Permohonan Rekomendasi Passport
560.52	Perjajian kerja TKI / TKW
560.53	Kartu Identitas Tenaga Kerja Indonesia (KITKI)
560.54	Permohonan Fiskal Ke Luar Negeri
560.55	Pelatihan TKI / TKW
560.6	Pemberangkatan Naker
560.61	Pemberangkatan Keluar Negeri
560.62	Pembekalan Akhir Pemberangkatan TKI / TKW Ke luar Negeri
560.63	Berita Acara Serah Terima TKI / TKW
560.7	Pemulangan Naker
560.71	Kepulangan TKI/TKW Karena Kontraknya Habis
560.72	Pemulangan TKI/TKW Ilegal
560.73	TKI/TKW Terkena Kasus Pidana
561.1	Kegiatan Dan Hasil Sidang Dewan Penelitian Pengupahan Daerah /Nasional
561.2	Permohonan Penangguhan Pelaksanaan Pembayaran Upah Minimum Kabupaten /Kota dan Provinsi
561.3	Kebutuhan Fisik Minimum
561.4	Perhitungan upah Kerja (Termasuk didalamnya Upah lembur)
561.5	Laporan Data Remittance
561.6	Pembayaran Gaji /Upah TKI/TKW
562.1	Penempatan Naker Mandiri Terdidik (TKMT)
562.11	Penempatan Naker Mandiri Profesional (TKMP)
562.12	Penempatan Naker Non Terdidik dan Non Profesional (Termasuk didalamnya penempatan pekerja anak)
562.13	Pengembangan Kesempatan Berusaha/ Perluasan Kerja (Termasuk di dalamnya penempatan pekerja Cacat)
562.2	Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)
562.3	Lembaga Penyalur Naker
562.31	Ijin Pendirian Lembaga Penyalur Naker Antar Kerja Lokal / Daerah dan antar Kerja Negara (AKAN)
562.32	Data Evaluasi Kinerja Jasa Tenaga Kerja (PJTKI / BKS / BKK)
562.33	Pencabutan Ijin Penyaluran Jasa Tenaga Kerja (PJTKI, BKK, BKS)

- 563.1 Pendidikan Pekerja
- 563.11 Pendidikan dan Latihan Kerja
- 563.12 Diklat Di Dalam Negeri (PKL,Prakerin,OJT)
- 563.13 Diklat Di Luar Negeri(pemagangan)

- 563.2 Sarana dan Prasarana Latihan Kerja
- 563.21 Tempat Pelatihan (BLK)
- 563.22 Instruktur/Pelatihan
- 563.23 Modul/Silabus dan Bahan Praktek
- 563.24 Kurikulum dan Metode Pengajaran
- 563.25 Sertifikat

- 563.3 Kerjasama Pelatihan Tenaga Kerja

- 564 Tenaga Sukarela
- 564.1 Butsi
- 564.2 Padat Karya
- 565 Perselisihan Perburuhan
- 565.1 Perselisihan dan Perkara Hukum Naker
- 565.11 Pengaduan Perkara Perburuhan /NAKER (termasuk didalamnya pendaftaran/ pencabutan perkara)
- 565.12 Pemeriksaan Perkara Perburuhan/NAKER
- 565.13 Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Perburuhan/NAKER
- 565.14 Sidang Perkara Perselisihan Perburuhan/NAKER (termasuk didalamnya jadwal, tempat pelaksanaan sidang dan pemanggilan yang berperkara)
- 565.15 Hasil Putusan Sidang Perkara Perselisihan Perburuhan (NAKER)
- 565.16 Peninjauan Kembali Hasil Putusan Sidang KP2K (P4D/P4P)
- 565.17 Permintaan Eksekusi Terhadap Hasil Keputusan KP2K (P4D/P4P)
- 565.18 Daftar Usulan ,Susunan dan Penetapan Anggota KP2K (P4D/P4P)beserta panitera

- 565.2 Pemogokan/Unjuk Rasa Tenaga Kerja
- 566 Keselamatan Kerja
- 566.1 Instalasi Proteksi Kebakaran
- 566.2 Pemakaian Alat Keselamatan Kerja
- 566.3 Keterangan Kelayakan atau Perlindung Diri (APD) dalam bekerja
- 566.4 Pengangkatan dan Pembinaan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
- 566.5 Pelatihan/Pembinaan Hyperkes dan Keselamatan Kerja
- 566.6 Pengujian dan Hasil Pemeriksaan Hyperkes
- 566.7 Gangguan Lingkungan Tempat Usaha (misal: suara bising,limbah,dll)

- 566.8 Perlengkapan Sarana Kerja
- 566.81 Pemasangan dan Pemakaian Lift (pesawat angkat/angkut)
- 566.82 Pemasangan dan Pemakaian Pesawat Uap (katel uap)
- 566.83 Pemasangan dan Pemakaian Motor Diesel
- 566.84 Pemasangan dan Pemakaian Tanki Tak Bertekanan
- 566.85 Pemasangan dan Pemakaian Alat Pemadam Kebakaran

- 566.9 Ijin Tenaga Kerja Wanita Masuk Malam Hari (sip malam)
- 567 Pemutusan Hubungan Kerja
- 567.1 Pengaduan PHK Sepihak
- 567.2 PHK Masal
- 567.3 Bantuan Hukum bagi Pekerja yang di PHK
- 567.4 Ijin Melakukan PHK

- 567.5 Penghitungan Masa Kerja Bagi Pekerja Yang di PHK
 567.6 Pemberian Uang Tunggu Bagi Pekerja Yang di PHK
 567.7 Pemberian Uang Pesangon Bagi Pekerja Yang di PHK
- 568 Kesejahteraan Buruh
 568.1 Bantuan Kredit / Bantuan Modal Kerja Bagi Naker
 568.11 Pemilihan Pekerja Teladan
 568.2 Perumahan Pekerja
 568.3 Keikutsertaan Pekerja Dalam Program Jamsostek
 568.4 Koperasi Pekerja
 568.5 Sarana Transportasi Pekerja
 568.6 Perpustakaan Pekerja
 568.7 Tempat Ibadah Pekerja
 568.8 Rekreasi dan Olah Raga Pekerja
- 568.9 Pendirian, Pendaftaran, dan Kegiatan Organisasi Pekerja
 568.91 Lembaga Kerjasama Bipartid
- 569 Tenaga Kerja Orang asing
 569.1 Rekomendasi Perpanjangan Ijin Kerja Tenaga Asing (IKTA)
 569.2 Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)
 569.3 Kualifikasi Keahlian Tenaga Kerja Asing
 569.4 Perjanjian Kerja dengan Negara Asing
 569.5 Data Tenaga Kerja Asing
 569.6 Kecelakaan / Kematian Tenaga Kerja asing, Perselisihan Kerja, dan Pengaduan Tenaga Kerja Asing
 569.7 Pemulangan Tenaga Kerja Asing
 569.8 berdayaan dan Kontribusi Tenaga Kerja asing
 569.9 Tenaga Kerja asing Ilegal
- 570 M
 570.1 Penanaman Modal Antar Propinsi
 570.2 Kerjasama Penanaman Modal antar Kabupaten
 571 Modal Asing
 572.1 Perusahaan (Joint Venture) / Penyertaan Modal
 573 Dasar Uang dan Modal
 574
 575
 576
 577
 578
 579
 580 PERBANK
 581 Kredit
 582
 583 Tabungan dan Penyisihan
 583.1 Deposito
 583.2 Tabanas
 583.3 Taska
 583.4 Tapelpram
- 584 Bank Pembanguna Daerah

593.2	Hak Milik
593.21	Perorangan
593.22	Badan Hukum
593.3	Hak Pakai
593.31	Perorangan
593.311	Warga Negara Indonesia
593.312	Warga Negara Asing
593.32	Badan Hukum
593.321	Badan Hukum Indonesia
593.322	Badan Hukum asing, Kedutaan, Konsulat, Kantor Dagang asing
593.33	Tanah Gedung-gedung Negeri
593.4	Guna Usaha
593.41	Perkebunan Besar
593.42	Perkebunan Rakyat
593.43	Peternakan
593.44	Perikanan
593.45	Kehutanan
593.5	Hak Guna bangunan
593.51	Perorangan
593.52	Badan Hukum
593.53	P3MB (Panitia Pelaksana Pengusahaan Milik Belanda)
593.54	Badan Hukum Asing Belanda – PBK No. 5/65
593.55	Pemulihan Hak (pen Pres 4/1960)
593.6	Hak Pengelolaan
593.61	PN Perumnas, Bonded Ware House, Industrial Estate, Real Estate
593.62	Perusahaan Daerah Pembangunan Perumahan
593.7	Sengketa Tanah
593.71	Peradilan Perkara Tanah (lihat Juga 183)
593.8	Pencabutan dan Pembebasan tanah
593.81	Pencabutan Hak
593.82	Pembebasan Tanah
593.83	Ganti Rugi Tanah
594	Pendaftaran Tanah
594.1	Pengukuran/Pemetaan
594.11	Fotogrametri
594.12	Terristris
594.13	Triangulasi
594.14	Peralatan
594.2	Dana pengukuran (Permen Agraria No. 6/1960)
594.3	Sertifikat
594.4	Pejabat Pembuat Akte Tanah
595	Transmigrasi
595.1	Tata Guna Tanah
595.2	Landreform

595.3	Pengurusan Hak-hak Tanah
595.4	Pendaftaran Tanah
596	-
597	-
598	-
599	-
600	PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN
601	Tata Bangunan Kontruksi, Industri Konstruksi
602	Prakualifikasi
602.1	Daftar Rekanan mampu
602.2	Tanda Daftar Rekanan
602.3	Kontraktor, Pemborong
602.4	Tender
602.5	Penunjukkan
602.51	Penunjukkan Langsung
603	Arsitektur
604	Bahan Bangunan
604.1	Tanah dan Batu seperti : Batu belah, Steen slaag, Split dan sebagainya)
604.2	Aspal
	Aspal buatan, aspal alam (butas)
604.3	Besi dan Logam lainnya
604.31	Besi Beton
604.32	Besi profil (konstruksi)
604.33	Paku
604.34	Aluminium Profil
604.4	Bahan-bahan pelindung dan Pengawet (cat, tech oil, pengawet kayu)
604.5	Semen
604.6	Kayu
	(Seperti : balok, papan, dolken, plywood, gabus dsb)
604.7	Bahan penutup atap
	(genting, asbes gelombang)
604.8	Alat-alat penggantung dan pengunci
604.9	Bahan-bahan bangunan lainnya
605	INSTALASI
605.1	Instalasi bangunan
605.2	Instalasi Listrik
605.3	Instalasi Air/sanitasi
605.4	Instalasi Pengatur Udara
605.5	Instalasi akustik
605.6	Instalasi cahaya/penerangan
606	Konstruksi pencegahan
606.1	Konstruksi Pencegahan Terhadap Kebakaran
606.2	Terhadap Gempa
606.3	Terhadap Angin/Udara Panas

606.4	Terhadap kegaduhan
606.5	Terhadap gas/explosive
606.6	Terhadap serangga
606.7	Terhadap Radiasi atom
607	-
608	-
609	-
610	PENGAIRAN
611	Irigasi
611.1	Bangunan Waduk
611.11	Bendungan
611.12	Tanggul
611.13	Pelimpahan Banjir
611.14	Menara pengambilan
611.15	Pembangunan dermaga
611.2	Bangunan pengambilan
611.21	Bendung
611.22	Bendung dengan pintu bilas
611.23	Bendung dengan pompa
611.24	Pengambilan bebas
611.25	Pengambilan bebas dengan pompa
611.26	Sumur dengan pompa
611.27	Kantung lumpur
611.28	Silf Ekstretor
611.29	Escape chenel
611.3	Bangunan pembawa
611.31	Saluran
611.311	Saluran Induk
611.312	Saluran Sekunder
611.313	Suplesi
611.314	Tersier
611.315	Saluran Kwarter
611.316	Saluran Pasangan
611.317	Saluran tertutup / terowongan
611.32	Bangunan
611.321	Bangunan bagi
611.322	Bangunan bagi dan sadap
611.323	Bangunan sadap
611.324	Bangunan check
611.325	Bangunan terjun
611.33	Bax Tersier
611.34	Got miring
611.35	Talang
611.36	Syphon
611.37	Gorong-gorong
611.38	Pelimpahan samping

611.4	Bangunan pembuangan
611.41	Saluran
611.411	Saluran Pembuang Induk
611.412	Saluran Pembuang Sekunder
611.413	Saluran Pembuang Tersier
611.42	Bangunan
611.421	Bangunan outlet
611.422	Bangunan terjun
611.423	Bangunan penahan banjir
611.43	Gorong-gorong pembuang
611.44	Talang pembuang
611.45	Syphon pembuang
611.5	Bangunan lainnya
611.51	Jalan
611.511	Jalan Inspeksi
611.512	Jalan Logistik
611.52	Jembatan
611.521	Jembatan Inspeksi
611.522	Jembatan hewan
611.53	Tangga cuci
611.54	Kubangan kerbau
611.55	Waduk lapangan
611.56	Bangunan penunjang
611.57	Jaringan telepon
611.58	Stasiun Agro
611.59	Bangunan TPI dan Pasar Ikan
612	P o l d e r
612.1	Tanggul keliling
612.11	Tanggul
612.12	Bangunan penutup sungai
612.13	Jembatan
612.2	Bangunan Pembawa
612.21	Saluran
612.211	Saluran muka
612.212	Saluran pembawa induk
612.213	Saluran pembawa sekunder
612.214	Saluran Stasiun Pompa Pemasukan
612.22	Bangunan bagi
612.221	Gorong-gorong
612.222	Syphon
612.3	Bangunan pembuang
612.31	Stasiun Pompa Pembuangan
612.32	Saluran
612.321	Saluan pembuangan induk
612.322	Saluran pembuangan sekunder

612.33	Pintu Air Pembuangan
612.34	Gorong-gorong Pembuangan
612.35	Syphon Pembuangan
612.4	Bangunan lainnya
612.41	Bangunan
612.411	Bangunan Pengukur Air
612.412	Bangunan Pengukur Curah Hujan
612.413	Bangunan Gudang Stasiun Pompa
612.414	Bangunan Listrik Stasiun Pompa
612.42	Rumah Petugas Eksploitasi
613	Pasang Surut
613.1	Bangunan Pembawa
613.11	Saluran
613.111	Saluran Pembawa Induk
613.112	Saluran Pembawa Sekunder
613.113	Saluran Pembawa Tersier
613.114	Saluran Penyimpanan Air
613.115	Bangunan Pintu Pemasukan
613.2	Bangunan Pembuang
613.21	Saluran
613.211	Saluran Pembuang Induk
613.212	Saluran Pembuang Sekunder
613.213	Saluran Pembuang Tersier
613.214	Saluran Penyimpanan Air
613.215	Bangunan Pintu Pembuangan
613.3	Bangunan lainnya
613.31	Kolom Pasang
613.32	Saluran
613.321	Saluran Lalu Lintas
613.322	Saluran Muka
613.33	Bangunan
613.331	Bangunan Penangkis Kotoran
613.332	Bangunan Pengukur Muka Air
613.333	Bangunan Pengukur Curah Hujan
613.34	Jalan
613.35	Jembatan
614	Pengendalian Sungai
614.1	Bangunan Pengaman
614.11	Tanggul Banjir
614.12	Pintu Pengatur Banjir
614.13	Klep Pengatur Banjir
614.14	Tembok Pengaman Talud
614.15	K r i b
614.16	Kantung Lumpur
614.17	Check Dam
614.18	Syphon

614.2	Saluran Pengaman
614.21	Saluan Banjir
614.22	Saluran Drainage
614.23	Corepure
614.3	Bangunan lainnya
614.31	Warning System
614.32	Stasiun
614.321	Stasiun Pengukur Curah Hujan
614.322	Stasiun Pengukur air
614.323	Stasiun Pengukur Cuaca
614.324	Stasiun pos Penjagaan
615	Pengaman Pantai
615.1	Tanggul
615.2	K r i b
615.3	Bangunan lainnya
616	Air Tanah
616.1	Stasiun Pompa
616.2	Bangunan Pembawa
616.3	Bangunan Pembuang
616.4	Bangunan lainnya
617	-
618	-
619	-
620	JALAN
621	Jalan kota
621.1	Daerah Penguasaan
621.11	T a n a h
621.12	Tanaman
621.13	Bangunan
621.2	Bangunan Sementara
621.21	Jalan Sementara
621.22	Kantor Proyek
621.23	Gedung Proyek
621.24	Barak Kerja
621.25	Laboratorium Lapangan
621.26	R u m a h
621.3	Badan Jalan
621.31	Pekerjaan tanah (earth work)
621.32	Stabilisasi
621.4	Perkerasan
621.41	Lapisan Pondasi Bawah
621.42	Lapisan Pondasi
621.43	Lapisan Permukaan
621.5	Drainage
621.51	Parit Tanah
621.52	Gorong-gorong (culvert)

621.6	Buku Trotoar
621.61	Tanah
621.62	Perkerasan
621.63	Pasangan
621.7	M e d i a n
621.71	T a n a h
621.72	Tanaman
621.73	Perkerasan
621.74	Pasangan
621.8	Daerah samping
621.81	Tanaman
621.82	Pagar
621.9	Bangunan Pelengkap dan Pengaman
621.91	Rambu-rambu / tanda-tanda lalu lintas
621.92	Lampu Penerangan
621.93	Lampu Pengatur Lalu Lintas
621.94	Patok-patok KM
621.95	Patok-patok R.O.W (Sempadan)
621.96	Rel Pengaman
621.97	P a g a r
621.98	Turap Penahan
621.99	Bronjong
622	Jalan Luar Kota
622.1	Daerah Penguasaan
622.11	Tanah
622.12	Tanaman
622.13	Bangunan
622.14	Jalan Sementara
622.15	Jembatan sementara
622.16	Kantor / Gedung Proyek
622.17	Barak kerja
622.18	Laboratorium lapangan
622.19	Rumah
622.2	Badan jalan
622.21	Pekejaan tanah (earth work)
622.22	Stabilisasi
622.3	Perkerasan (pavement)
622.31	Lapis Pondasi bawah
622.32	Lapis pondasi
622.33	Lapis Permukaan
622.4	Drainage
622.41	Parit
622.42	Gorong-gorong (Culvert)
622.43	Sub Drainage

622.5	Trotoar
622.51	Tanah
622.52	Perkerasan
622.6	Median
622.61	Tanah
622.62	Tanaman
622.63	Perkerasan
622.64	Pasangan
622.7	Daerah Samping
622.71	Tanaman
622.72	Pagar
622.8	Bangunan Pelengkap dan Pengamanan
622.81	Rambu-rambu
622.82	Lampu Penerangan
622.83	Lampu Pengatur Lalu Lintas
622.84	Patok-patok KM
622.85	Patok-patok R,O,W (sempadan)
622.86	Rel Pengaman
622.87	Pagar
622.88	Turap Penahan
622.89	Bronjong
623	-
624	-
625	-
626	-
627	-
628	-
629	-
630	JEMBATAN
631	Jembatan pada jalan kota
631.1	Daerah Penguasaan
631.11	Tanah
631.12	Tanaman
631.13	Bangunan
631.2	Bangunan Sementara
631.21	Jalan Sementara
631.22	Jembatan Sementara
631.23	Kantor Proyek
631.24	Gedung Proyek
631.25	Barak Kerja
631.26	Laboratorium lapangan
631.27	Rumah
631.3	Pekerjaan Tanah (earth work)
631.31	Galian Tanah
631.32	Timbunan Tanah

631.4	Pondasi
631.41	Pondasi Kepala Jembatan
631.42	Pondasi Pilar
631.43	Pondasi Angker
631.5	Bangunan Bawah
631.51	Kepala Jembatan
631.52	Pilar
631.53	Piloon
631.54	Landasan
631.6	Bangunan
631.61	Gelagar
631.62	Lantai
631.63	Perkerasan
631.64	Jalan orang/trotoir
631.65	Sandaran
631.66	Talang air
631.7	Bangunan Pengaman
631.71	Turap/penahan
631.72	Bronjong
631.73	Strek Dam
631.74	Kist Dam
631.75	Coupure
631.76	Krib
631.8	Bangunan Pelengkap
631.81	Rambu-rambu / Tanda-tanda lalu lintas
631.82	Patok Pengaman
631.83	Patok R.O.W (sempadan)
631.9	Oprit
631.91	Badan
631.92	Perkerasan
631.93	Drainage
631.94	Baku
631.95	Medium
632	Jembatan pada jalan luar kota
632.1	Daerah Penguasaan
632.11	Tanah
632.12	Tanaman
632.13	Bangunan
632.2	Bangunan Sementara
632.21	Jalan Sementara
632.22	Jembatan Sementara
632.23	Kantor Proyek
632.24	Gedung Proyek
632.25	Barak kerja
632.26	Laboratorium lapangan
632.27	Rumah

632.3	Pekerjaan tanah (earthwork)
632.31	Galian tanah
632.32	Timbunan tanah
632.4	Pondasi
632.41	Pondasi Kepala Jembatan
632.42	Pondasi Pilar
632.43	Pondasi Angker
632.5	Bangunan bawah
632.51	Kepala jembatan
632.52	Pilar
632.53	Piloon
632.54	Landasan
632.6	Bangunan atas
632.61	Gelagar
632.62	Lantai
632.63	Perkerasan
632.64	Jalan orang/trotoir
632.65	Sandaran
632.66	Talang air
632.7	Banguan Pengaman
632.71	Turap / penahan
632.72	Bronjong
632.73	Strek Dam
632.74	Kist Dam
632.75	Coupute
632.76	Kriup
632.8	Bangunan Pelengkap
632.81	Rambu-rambu/Tanda-tanda Lalu Lintas
632.82	Patok Pengaman
632.83	Patok R.O.W (Sempadan)
632.9	Sprit
632.91	Badan
632.92	Perkerasan
632.93	Drainage
632.94	Baku
632.95	Median
633	--
634	--
635	--
636	--
637	--
638	--
639	--

640	BANGUNAN
641	Bangunan Pemerintah
641.1	Gedung pengadilan
641.2	Rumah Pejabat Negara
641.3	Gedung DPR
641.4	Gedung Balai Kota
641.5	Penjara
641.6	Perkantoran
642	Bangunan Pendidikan
642.1	Taman Kanak-Kanak
642.2	SD & Sekolah Menengah
642.3	Perguruan Tinggi
643	Bangunan Rekreasi
643.1	Bangunan Olahraga
643.2	Gedung Kesenian
643.3	Gedung Pemancar
644	Bangunan Perdagangan
644.1	Pusat Perbelanjaan
644.2	Gedung Perdagangan
644.3	B a n k
644.4	Perkantoran
645	Bangunan Pelayanan Umum
645.1	Mandi, cuci, kakus (MCK) umum
645.2	Gedung Parkir
645.3	Rumah Sakit
645.4	Gedung Telkom
645.5	Terminal Angkutan Udara
645.6	Terminal Angkutan Air
645.7	Terminal Angkutan Darat
645.8	Bangunan Keagamaan
646	Bangunan Peninggalan Sejarah
646.1	Monumen
646.2	Candi
646.3	Kraton
646.4	Rumah Tradisional
647	Bangunan Industri
648	Bangunan Tempat Tinggal
648.1	Rumah Perkantoran
648.11	Inti/ Sederhana
648.12	Sedang / Mewah
648.2	Rumah Pedesaan
648.21	Rumah contoh
648.3	Real Estate

649	Elemen Bangunan
649.1	Pondasi
649.11	Diatas tiang
649.2	Dinding
649.21	Penahan Beban
649.22	Tidak menahan beban
649.3	A t a p
649.4	Lantai / langit-langit
649.41	Suspended
649.42	Solit
649.5	Pintu / jendela
649.51	Pintu Hermonik
649.52	Pintu biasa
649.53	Pintu sorong
649.54	Jendela kayu
649.55	Jendela sorong
649.56	Jendela vertikal
650	TATA RUANG KOTA
651	Daerah Perdagangan / Pelabuhan
651.1	Daerah Pusat Perbelanjaan
651.2	Daerah Perkantoran
652	Daerah Pmerintahan
653	Daerah Perumahan (Site & Servei)
653.1	Kepadatan Rendah (Low Density)
653.2	Kepadatan Tinggi (High Density)
654	Daerah Industri
654.1	Industri Berat
654.2	Industri Ringan
654.3	Industri Rumah (Home Industri)
655	Daerah Rekreasi (Open Spece)
655.1	Publik Garden
655.2	Spot & playing fields
655.3	Open Space
656	Transportasi (tata letak)
656.1	Jaringan Jalan
656.11	Penerangan Jalan
656.2	Jaringan Kereta Api
656.3	Jaringan Sungai
657	Assineering
657.1	Saluran Pengumpulan

657.2 Instansi Pengolahan
657.21 Bangunan
657.22 Bangunan Penyaring
657.23 Banguann Penghancur Kotoran
657.24 Bangunan Pengendapan
657.25 Bangunan Pengering Lumpur
657.26 Unit Disinfektan
657.27 Unit Perpompaan

658 Kesehatan Lingkungan
658.1 Persampahan
658.11 Bangunan Pengumpul
658.12 Bangunan Pemusnahan

658.2 Pengotoran Udara

658.3 Pengotoran Air
658.31 Air Buangan Industri

658.4 Kegaduhan
658.5 Kebersihan Kota
659 -

660 TATA LINGKUNGAN

660.1 Lingkungan Hidup
660.2 Kebersihan Lingkungan

660.3 Pencemaran
660.31 Pencemaran Air
660.32 Pencemaran Udara

661 Daerah Hutan
662 Daerah Pemukiman
663 Pusat Pertumbuhan

664 Transportasi
665.1 Jaringan Jalan
665.2 Jaringan Kereta Api
665.3 Jaringan Sungai

666 -
667 -
668 -
669 -

670 KETENAGAAN

671 Listrik
671.1 Kelistrikan
671.11 Kelistrikan PLN
671.12 Kelistrikan Non PLN

671.2	Pembangkit Tenaga Listrik
671.21	PLTA – Pembangkit Listrik Tenaga Air
671.22	PLTD – Pembangkit Listrik Tenaga Diesel
671.23	PLTG – Pembangkit Listrik Tenaga Gas
671.24	PLTM – Pembangkit Listrik Tenaga Matahari
671.25	PLTN – Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir
671.26	PLTPB – Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi
671.27	PLTU – Pembangkit Listrik Tenaga Uap
671.3	Transmisi Tenaga Listrik
671.31	Gardu Induk / Gardu Penghubung / Gardu Trafo
671.32	Saluran Udara Tegangan Tinggi
671.33	Kabel Bawah Tanah
671.4	Distribusi Tenaga Listrik
671.41	Gardu Distribusi
671.42	Tegangan Menengah
671.43	Tegangan Rendah
671.44	Jaringan Bawah Tanah
671.5	Pengusahaan Listrik
671.51	Sambungan Listrik
671.52	Penjualan Tenaga Listrik
671.53	Tarif Listrik
672	Tenaga Air
673	Tenaga Minyak
674	Tenaga Gas
675	Tenaga Matahari
676	Tenaga Nuklir
677	Tenaga Panas Bumi
678	Tenaga Uap
679	Tenaga Lainnya
680	PERALATAN
681	–
682	--
683	–
684	–
685	–
686	--
687	–
688	–
689	--
690	AIR MINUM
691	Intake
691.1	Broncaptering
691.2	Sumur
691.3	Bendungan
691.4	Saringan (Screen)
691.5	Pintu Air

691.6	Saluran Pembawa
691.7	Alat Ukur
691.8	Perpompaan
692	Transmisi Air Baku
692.1	Perpipaan
692.2	Katup Udara (Air Rolief)
692.3	Tutup Penguras (Blow oof)
692.4	Bak Pelepas Tekanan
692.5	Jembatan Pipa
692.6	Syphon
693	Instalasi Pegelolaan
693.1	Bangunan Ukur
693.2	Bangunan Aerasi
693.3	Bangunan Pengendapan
693.4	Bangunan Pembubuh Bahan Kimia
693.5	Bangunan Pengaduk
693.6	Bangunan Saringan
693.7	Perpompaan
693.8	Clear Hell
694	Distribusi
694.1	Reservoir menara bawah tanah
694.11	Menara
694.12	Reservoir dibawah tanah
694.2	Perpipaan
694.3	Perpompaan
694.4	Jembatan pipa
694.5	Syphon
694.6	Hydran
694.61	Hydran Umum
694.62	Hydran Kebakaran
694.7	Katup
694.71	Katup Udara (air relief)
694.72	Katup Pelepas (blow off)
694.8	Bak Pelepas Tekanan (pressuer reducing valve)
695	-
696	-
697	-
698	-
699	-
700	PENGAWASAN
701	Pengawasan Urusan Dalam meliputi pengawasan sarana dan fasilitas kantor
702	Pengawasan Peralatan
703	Pengawasan Kekayaan

- 704 Pengawasan Perpustakaan dan Dokumen
- 705 Pengawasan Perencanaan Pengadaan / Proyek
- 706 Pengawasan Organisasi dan Tata Laksana
- 707 Pengawasan Penelitian / Riset
- 708 Pengawasan Konferensi / Rapat Dinas
- 709 Pengawasan Perjalanan Dinas Pejabat / PNS

710 BIDANG PEMERINTAHAN

- 711 Pengawasan Pemerintahan Pusat
- 712 Pengawasan Pemerintahan Provinsi
- 713 Pengawasan Pemda Kabupaten / Kota
- 714 Pengawasan Pemerintah Desa
- 715 Pengawasan DPR / MPR / DPD
- 716 Pengawasan DPRD Provinsi
- 717 Pengawasan DPRD Kabupaten / Kota
- 718 Pengawasan Hukum / Konstitusi / Peraturan Lain
- 719 Pengawasan Hubungan Luar Negeri

720 BIDANG POLITIK

- 721 Pengawasan Partai
- 721.1 Keanggotaan
- 721.2 Pendirian / Pembubaran
- 721.3 Pelanggaran Pemasangan Atribut Partai

- 722 Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan / Agama / Kepercayaan terhadap Tuhan YME
- 723 Pengawasan Organisasi Profesi dan Fungsional
- 724 Pengawasan Organisasi Kepemudaan / Olah Raga
- 725 Pengawasan Buruh, Tani, Nelayan
- 726 Pengawasan Organisasi Wanita

- 727 Pengawasan Pemilu
- 727.1 Pemilu Legislatif dan DPD
- 727.2 Pemilu Eksekutif / Presiden

- 728 Pengawasan Keanggotaan PNS dalam Partai
- 729 Pengawasan Pendanaan Partai

730 BIDANG KEAMANAN / KETERTIBAN

- 731 Pengawasan Pertahanan
- 732 Pengawasan Keamanan
- 733 Pengawasan Penegak Hukum
- 734 Pengawasan Perlindungan Masyarakat

- 735 Pengawasan Penyimpangan Pejabat / PNS
- 735.1 Persengketaan PNS
- 735.2 Pembunuhan
- 735.3 Penganiayaan / Perampokan / Pencurian
- 735.4 Pemalsuan
- 735.5 Tindakan Asusila / Pelecehan Seksual
- 735.6 Korupsi / Penyalahgunaan Jabatan Struktural (lihat 356)

- 736 Pengawasan Bencana Alam
- 737 Pengawasan SAR / Bencana
- 738 Pengawasan Keamanan Aparat / Pejabat
- 739 Pengawasan Lingkungan Hidup

- 740 BIDANG KESRA**

- 741 Pengawasan Pembangunan Desa

- 742 Pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan
 - 742.1 Kesejahteraan Guru
 - 742.2 Fasilitas / Sarana
 - 742.3 Mutu Pendidikan

- 743 Pengawasan Kebudayaan
 - 743.1 Kebudayaan Daerah / Nasional
 - 743.2 Kebudayaan Asing

- 744 Pengawasan Kesehatan / Makanan / Obat
- 745 Pengawasan SARA (Suku Agama Ras)
- 746 Pengawasan Kesejahteraan Sosial
- 747 Pengawasan Kependudukan Migrasi / Urbanisasi
- 748 Pengawasan Kehumasan / Media Massa
- 749 Pengawasan Bantuan / Subsidi Masyarakat

- 750 BIDANG PEREKONOMIAN**

- 751 Pengawasan Perdagangan
- 752 Pengawasan Pertanian
- 753 Pengawasan Perindustrian
- 754 Pengawasan Pertambangan / Kelautan
- 755 Pengawasan Perhubungan
- 756 Pengawasan Tenaga Kerja
- 757 Pengawasan PMDN / PMA
- 758 Pengawasan Perbankan / Moneter
- 759 Pengawasan Pertahanan / BPN

- 760 BIDANG PEKERJAAN UMUM**

- 761 Pengawasan Pengairan
- 762 Pengawasan Jalan
- 763 Pengawasan Jembatan
- 764 Pengawasan Bangunan
- 765 Pengawasan Tata Ruang Kota
- 766 Pengawasan Tata Lingkungan
- 767 Pengawasan Ketenagaan
- 768 Pengawasan Peralatan
- 769 Pengawasan Air Minum
- 770 Pengawasan Pejabat Publik

- 771 Pemilihan Gubernur / Bupati / Walikota
- 772 Serah Terima Jabatan Politik
- 773 Laporan Pertanggungjawaban Pusat
- 774 Laporan Pertanggungjawaban Gubernur

- 775 Laporan Pertanggungjawaban Bupati / Walikota
- 776 Penolakan LPJ
- 777 Penyimpangan Pejabat Publik
- 778 Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara
- 779 Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)

780 BIDANG KEPEGAWAIAN

- 781 Pengawasan Pengadaan PNS
- 782 Pengawasan Pengangkatan dan Mutasi
- 783 Pengawasan Kedudukan / Jabatan
- 784 Pengawasan Kesejahteraan PNS
- 785 Pengawasan Cuti
- 786 Pengawasan Penilaian dan Disiplin PNS
- 787 Pengawasan Pemberhentian PNS
- 788 Pengawasan Tata Usaha / Administrasi PNS
- 789 Pengawasan Pendidikan PNS

790 BIDANG KEUANGAN

- 791 Pengawasan Anggaran / APBD
- 792 Pengawasan Otorisasi
- 793 Pengawasan Verifikasi
- 794 Pengawasan Pembukuan
- 795 Pengawasan Perbendaharaan
- 796 Pengawasan Pembinaan Perbendaharaan
- 797 Pengawasan Pendapatan/penerimaan pajak
- 798 Pengawasan Keuangan Pendidikan PNS
- 799 Pengawasan Bendaharawan / Pemegang Kas

800 KEPEGAWAIAN

800.1 Klasifikasi disini : Kebijakan Kepegawaian
Perencanaan

- 800.2 Penelitian
- 800.21 Pengaduan
- 800.22 T e a m
- 800.23 Statistik
- 800.24 Peraturan Perundang-undangan

810 PENGADAAN

Meliputi lamaran, pengujian kesehatan dan pengangkatan calon pegawai

- 811 Lamaran
- 811.1 Testing
- 811.2 Screening
- 811.3 Panggilan

812 Pengujian Kesehatan

- 813 Pengangkatan Calon Pegawai
- 813.1 Pengangkatan Calon Pegawai Golongan I
- 813.2 Pengangkatan Calon Pegawai Golongan II
- 813.3 Pengangkatan Calon Pegawai Golongan III
- 813.4 Pengangkatan Calon Pegawai Golongan IV

814	Pengangkatan Tenaga Non PNS
814.1	Pengangkatan Tenaga Kontrak APBN
814.2	Pengangkatan Tenaga Kontrak APBD /Kabupaten
814.3	Pengangkatan Tenaga Kontrak Unit Kerja /APBD
814.4	Pengangkatan Tenaga Wiyata Bakti/Harian Lepas
815	Pengangkatan Tenaga Asing
816	-
817	-
818	-
819	-
820	MUTASI Meliputi pengangkatan, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, pemindahan, pelimpahan, detasering, tugas belajar dan wajib militer.
820.1	Golongan I
820.2	Golongan II
820.3	Golongan III
820.4	Golongan IV
820.5	Fungsional
821	Pengangkatan
821.1	Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil (tetap)
821.11	Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil Gol I
821.12	Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil Gol II
821.13	Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil Gol III
821.14	Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil Gol IV
821.2	Pengangkatan dalam jabatan, pembebasan dari jabatan, berita acara serah terima jabatan
821.21	Sekjen / Dirjen / Kaban / Sekda / Sekdan /Asisten Sekda
821.22	Kepala Biro / Direktur / Inspektur / Kepala Pusat / Sekretaris / Kepala Dinas / Kepala Badan / Kepala Kantor
821.23	Kepala Bagian / Kepala Sub Direktorat / Kepala Bidang / Inspektur Pembantu
821.24	Kepala Sub Bagian / Kepala Seksi / Kepala Sub Bidang / Pemeriksa / UPTD / UPPD
821.25	Kepala Bakorlin Wilayah I
821.26	C a m a t
821.27	Lurah Administratif (Lurah desa lihat 141)
821.28	Jabatan Lainnya
822	Kenaikan Gaji Berkala
822.1	Pegawai Golongan I
822.2	Pegawai Golongan II
822.3	Pegawai Golongan III
822.4	Pegawai Golongan IV
823	Kenaikan Pangkat / Pengangkatan
823.1	Pegawai Golongan I
823.2	Pegawai Golongan II
823.3	Pegawai Golongan III
823.4	Pegawai Golongan IV

- 824 Pemindahan / Pelimpahan / Perbantuan
824.1 Pegawai Golongan I
824.2 Pegawai Golongan II
824.3 Pegawai Golongan III
824.4 Pegawai Golongan IV
824.5 Lolos Butuh
- 825 Detasering dan Penempatan Kembali
- 826 Penunjukan Tugas Belajar/Ijin Belajar
826.1 Dalam Negeri
826.2 Luar Negeri
826.3 Tunjangan Belajar
826.4 Penempatan Kembali
826.5 Ijin Belajar
826.6 Penggunaan Gelar
- 827 Wajib Militer
828 Mutasi Pegawai Instansi Lain
829 -
- 830 **KEDUDUKAN**
Meliputi perhitungan masa kerja, Kenaikan Pangkat penyesuaian Ijazah, penghargaan ijasah dan jenjang pangkat
- 831 Perhitungan Masa Kerja
- 832 Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah
832.1 Pegawai Golongan I
832.2 Pegawai Golongan II
832.3 Pegawai Golongan III
832.4 Pegawai Golongan IV
- 833 Penghargaan Ijasah
834 Penghargaan Teknologi Tepat Guna
835 Penghargaan Humas
836 Penghargaan Lingkungan Hidup
837 Penghargaan Kemanusiaan
838 Penghargaan Kewirausahaan
839 Penghargaan Kesenian
- 840 **KESEJAHTERAAN PEGAWAI**
Meliputi tunjangan, perawatan kesehatan, koperasi, distribusi, perumahan / tanah, bantuan sosial, rekreasi, dan dispensasi.
- 841 Tunjangan
841.1 Jabatan
841.2 Kehormatan
841.3 Kematian
841.4 Tunjangan Hari Raya
841.5 Perjalanan Dinas Tetap / Cuti / Pindah
841.6 Keluarga
841.7 Pangan, uang makan
- 842 Dana
842.1 Taspen
842.2 Kesehatan

842.3	Asuransi
843	Perawatan Kesehatan
843.1	Poliklinik
843.2	Perawatan Dokter
843.3	Obat-obatan
843.4	Keluarga Berencana
844	Koperasi / Distribusi
844.1	Distribusi Pangan
844.2	Distribusi Sandang
844.3	Distribusi Lainnya
845	Perumahan / Tanah
845.1	Perumahan Pegawai
845.2	Tanah Kapling
845.3	Losmen / Hotel
846	Bantuan Sosial
846.1	Bantuan Kebakaran
846.2	Bantuan Kebanjiran
847	Rekreasi
848	Dispensasi
849	-
850	C U T I Meliputi cuti tahunan, cuti besar, cutu sakit, cuti hamil, cuti naik haji, cuti di luar tanggungan negara dan cuti alasan lain
851	Cuti Tahunan
852	Cuti Besar
853	Cuti Sakit
854	Cuti Hamil
855	Cuti Naik Haji
856	Cuti Diluar Tanggungan Negara
857	Cuti Alasan Lain
858	-
859	-
860	PENILAIAN Meliputi penghargaan, hukuman, konduite, ujian dinas, penilaian kekayaan pribadi dan rehabilitasi
861	Penghargaan
861.1	Bintang / Satyalencana
861.2	Kenaikan Pangkat Anumerta
861.3	Kenaikan Gaji Istimewa
861.4	Hadiah berupa Pangkat
861.5	Pegawai Teladan
862	Hukuman
862.1	Tegoran / Peringatan
862.2	Penundaan Kenaikan Gaji
862.3	Penurunan Pangkat

862.4	Pemindahan/Mutasi
862.5	Pembebasan dari jabatan
<u>Catatan :</u>	Pemberhentian untuk sementara waktu dan pemberhentian tidak dengan hormat lihat 887 dan 888
863	Konduite
864	Ujian Dinas
864.1	Tingkat I
864.2	Tingkat II
864.3	Tingkat III
865	Penilaian Kehidupan Pegawai Negeri Meliputi Petunjuk pelaksanaan hidup sederhana, penilaian kekayaan pribadi (LP2P)
866	Rehabilitasi
867	-
868	-
869	-
870	TATA USAHA KEPEGAWAIAN Meliputi formasi, bezeting, registrasi, daftar riwayat, hak, penggajian, sumpah / janji dan Korps pegawai
871	Formasi
872	Bezeting
873	Registrasi
873.1	NIP
873.2	KARPEG
873.3	Legitimasi / Tanda Pengenal
873.4	Daftar Keluarga
873.5	KARSU / KARIS
874	Daftar Riwayat Pekerjaan
874.1	Tanggal Lahir
874.2	Penggantian Nama
874.3	Kepartaian / Organisasi
874.4	Daftar Riwayat Hidup
875	Kewenangan Mutasi Kepegawaian
875.1	Pelimpahan Wewenang
875.2	Spesimen Tanda Tangan
876	Penggajian
876.1	SKPP
877	Sumpah / Janji
878	Korps Kepegawaian
879	-
880	PEMBERHENTIAN Meliputi pemberhentian atas permintaan sendiri, dengan hak pensiun, karena meninggal dunia, alasan lain, dengan diberi uang pesangon, uang tunggu untuk sementara waktu dan pemberhentian dengan tidak hormat.
881	Permintaan sendiri

882	Dengan Hak Pensiun
882.1	Pemberhentian dengan Hak Pensiun Pegawai Negeri Gol I
882.2	Pemberhentian dengan Hak Pensiun Pegawai Negeri Gol II
882.3	Pemberhentian dengan Hak Pensiun Pegawai Negeri Gol III
882.4	Pemberhentian dengan Hak Pensiun Pegawai Negeri Gol IV
882.5	Pensiun Janda / Duda
882.6	Pensiun Yatim Piatu
882.7	Uang Muka Pensiun
883	Karena Meninggal
883.1	Karena Meninggal dalam Tugas
884	Alasan Lain
885	Uang Pesangon
886	Uang Tunggu
887	Sementara Waktu
888	Tidak Dengan Hormat
889	-
890	PENDIDIKAN PEGAWAI Meliputi perencanaan, pendidikan reguler, pendidikan non formal, pendidikan ke luar negeri, metode, tenaga pengajar, administrasi pendidikan, fasilitas dan sarana pendidikan.
891	Perencanaan
892	Pendidikan Reguler
892.1	I I P
892.2	Akademi
892.21	Agraria
892.22	Pemerintahan Dalam Negeri
892.3	Kursus-kursus Reguler
893	Pendidikan Non Reguler
893.1	SESPA / Diklat
893.2	SELAPUTDA
893.3	Kursus-kursus / Penataran
894	Pendidikan Ke Luar Negeri
895	Metode
895.1	Kuliah
895.2	Ceramah, Symposium
895.3	Diskusi
895.4	Luliah Lapangan, Widya Wisata, KKN
895.5	Kurikulum
895.6	Karya Tulis
896	Tenaga Pengajar
897	Akademi Pendidikan
897.1	Tahun Pelajaran
897.2	Persyaratan, meliputi pendaftaran, testing, ujian

898 Fasilitas
898.1 Tunjangan Belajar
898.2 Asrama
898.3 Uang Makan
898.4 Uang Transport
898.5 Uang Buku
899 Sarana
899.1 Buku
899.2 Gedung lihat 011; Peralatan lihat 020

900 KEUANGAN

901 -
902 -
903 -
904 -
905 -
906 -
907 -
908 -
909 -

910 ANGGARAN

911 Rutin
912 Anggaran Belanja Tambahan
913 RASK
914 DASK Dokumen
915 -
916 -
917 -
918 -
919 -

920 OTORISASI

921 Rutin
922 -
923 SIAP
923.1 SIAPDA
924 Ralat SKO
925 -
926 -
927 -
928 -
929 -

930 VERIFIKASI

931 -
932 -
933 -
934 SPJ Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
935 SPJ Pembangunan
936 -
937 -
938 -
939 -

940	PEMBUKUAN
941	Penyusunan Perhitungan Anggaran
942	Permintaan Dana Anggaran
943	Laporan Fisik Pembangunan
944	SPM
945	SPM Pembangunan
946	SP Pemindah Bukuan
947	SPP
948	--
949	--
950	PERBENDAHARAAN
951	Tuntutan Ganti Rugi (ICW Pasal 74)
952	Tuntutan Perbendaharaan
953	Penghapusan Kekayaan Negara
954	Pengangkatan / Pergantian Perbendaharaan
955	Specimen Tanda Tangan
956	Surat Tangihan Piutang
957	--
958	--
959	--
960	PEMBINAAN KEBENDAHARAAN
961	Pemeriksaan Kas dan Hasil Pemeriksaan Kas
962	Pemeriksaan Administrasi Bendaharawan
963	Laporan Keuangan Bendaharawan
964	--
965	--
966	--
967	--
968	--
969	--
970	PENDAPATAN
971	Perimbangan Keuangan
971.1	Bagi Hasil Pajak
971.11	Pajak Bumi Bangunan (PBB)
971.12	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (PBHTB)
971.13	Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPH Pasal 21)
971.2	Bagi Hasil Bukan Pajak
971.21	Pemberian Hak Atas Tanah Pemerintah
971.22	Provisi Sumber Daya Hutan
971.23	Sumber Daya Alam / Migas
971.24	Iuran Eksplorasi / Landrent
972	Subsidi
973	Pajak
973.1	Pajak Kendaraan Bermotor
973.2	Pajak Kendaraan Diatas Air
973.3	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
973.4	Bea Balik Nama Kendaraan Diatas Air
973.5	Pajak Bahan Kendaraan Bermotor

973.6	Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan ABT
973.7	Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan AP
974	Restribusi
974.1	Restribusi Pelayanan Kesehatan
974.2	Restribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
974.3	Restribusi Tempat Pelelangan Ikan
974.4	Restribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Vila
974.5	Restribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
974.6	Restribusi Hasil Hutan
974.61	Pengendalian Kayu Lintas Kabupaten / Kota
974.62	Ijin Pemanfaatan Flora dan Fauna
974.63	Tempat Pelelangan Hasil Hutan
974.7	Restribusi Ijin Pengambilan dan Pemanfaatan ABT / AP
974.8	Restribusi Bidang Metrologi
974.9	Restribusi Penyelenggaraan Perhubungan
974.91	Ijin Trayek
974.92	Penyelenggaraan Telkom
974.93	Dispensasi Kelebihan Muatan
975	Bea
976	Cukai
977	Pungutan
978	Bantuan
978.1	Bantuan Presiden
978.2	Bantuan Menteri
978.3	Bantuan Gubernur
978.4	Bantuan Bupati
978.5	Bantuan lainnya
979	Pendapatan Lainnya
979.1	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan
979.11	Pelepasan Hak Atas Tanah
979.12	Penjualan Rumah Jabatan / Rumah Dinas
979.13	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua
979.14	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat
979.15	Penjualan Bongkaran Bangunan dan Inventaris
979.16	Penjualan Drum Bekas
979.17	Penjualan Hasil Penebangan Pohon
979.2	Penerimaan Jasa Giro
979.21	Jasa Giro Kas Daerah
979.22	Jasa Giro Pemegang Kas
979.23	Jasa Giro Khusus
979.3	Penerimaan Bunga Bank
979.31	Bunga Deposito
979.32	Bunga Tabungan

979.4 Penerimaan Ganti Rugi Atas Kerugian / Kehilangan Kekayaan Daerah
 (TP-TGR)
979.41 Sumbangan Pihak Ke Tiga
979.42 Sumbangan Pihak Ke Tiga Kendaraan (Dealer)
979.43 Sumbangan Pihak Ke Tiga Kayu

979.5 Penerimaan Lain-lain
979.51 Penerimaan Kembali Kredit BKK
979.52 Ternak Tidak Layak Bibit
979.53 Sewa Internet
979.54 Penerimaan Dari Dana Bergulir / Revolving
979.55 Kerjasama dengan BUMIDA
979.56 Penerimaan DUKS
979.57 Tempat Rekreasi
979.58 Setoran TP-TGR
979.59 Penerimaan lainnya dari Setda / Dinas-dinas

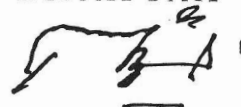
980 **PENGELUARAN**

981 -
982 -
983 -
984 -
985 -
986 -
987 -
988 -
989 -

990 **BENDA HARAWAN**

991 SKPP
992 Tegoran SPJ
993 -
994 -
995 -
996 -
997 -
998 -
999 -

BUPATI PATI



TASIMAN